

BAB VIII

PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1. Sinkronisasi Prioritas Nasional Provinsi dan Kabupaten

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa / kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Dalam setiap musrenbang ditetapkan tema dan prioritas program. Tema Pembangunan Nasional adalah: **“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemanfaatan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”**. Untuk mewujudkan tema pembangunan nasional tersebut ditetapkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional dan tiga prioritas lainnya sebagai berikut :

- 1) Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola,
- 2) Prioritas 2 : Pendidikan,
- 3) Prioritas 3 : Kesehatan,
- 4) Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan,
- 5) Prioritas 5 : Ketahanan Pangan
- 6) Prioritas 6 : Infrastruktur,
- 7) Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha,
- 8) Prioritas 8 : Energi,
- 9) Prioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- 10) Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik,
- 11) Prioritas 11 : Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Prioritas lainnya meliputi :

- 1) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,
- 2) Bidang Perekonomian,
- 3) Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Sementara itu pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan Tema Pembangunan Provinsi Sumatera selatan yaitu : **"Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas dan Berbudaya"**. Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut ditetapkan 10 (sepuluh) program prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Pendidikan
- 2) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- 3) Program Revitalisasi Lembaga Kepelatihan dan Keterampilan
- 4) Program Pembangunan Pertanian
- 5) Program Pembangunan Sumberdaya Energi
- 6) Program Pembangunan Industri Pengolahan dan Manufaktur
- 7) Program Pengembangan Inovasi
- 8) Program Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan
- 9) Program Kerjasama Ekonomi dan Kelembagaan
- 10) Program Pembangunan Pemerintahan

Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dengan mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, memperhatikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, mempertimbangkan isu, masalah serta tantangan yang masih dihadapi serta memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkembang pada pelaksanaan Musrenbang, maka ditetapkanlah tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas yaitu : **1) Musi Rawas Bumi Agropolitan, 2) Musi Rawas Kawasan Pertambangan dan 3) Musi Rawas Darussalam.**

Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM masyarakat, aparatur didukung oleh program pendidikan, keagamaan dan Kesehatan
- 2) Penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha baru yang didukung melalui pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, penanaman modal (investasi) koperasi dan UKM
- 3) Pengembangan sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk pengembangan agribisnis, aparatur (pelayanan umum) dan investasi didukung oleh bidang pekerjaan umum dan perhubungan serta IPTEK
- 4) Mendorong dan memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan di dukung oleh sektor ekonomi riil, fisik, saran dan prasarana serta budaya.

Masing-masing prioritas diimplementasikan pada Program Prioritas SKPD, Lintas SKPD dan Lintas Wilayah.

8.2. Program Prioritas SKPD

8.2.1 Dinas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Musi Rawas harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.

A. Permasalahan

Secara garis besar permasalahan pendidikan meliputi : (1). tingkat pendidikan penduduk relatif rendah; (2) dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya teratasi dalam pembangunan pendidikan; (3) masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok masyarakat; (4) fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata; (5) kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik ; (6) pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan; (7) belum terkoordinasinya pendidikan tinggi di Kabupaten Musi Rawas; (8) manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien ; (9) anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai.

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka ditetapkan sasaran dan rencana target capaian kinerja sebagaimana tabel 8.1.

Tabel 8.1
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Pendidikan Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2011-2015

No	Sasaran SKPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Meningkatnya Rata-rata lama sekolah naik dari 7,1 menjadi 9,0	7,25	7,55	8,05	8,65	9,00	9,00
2	Menurunnya angka Buta Aksara. Turun sebesar 1,77%	2,0 %	1,85 %	1,30%	0,90%	0,50%	0,50%
3	Meningkatnya APK PAUD/TK sebesar 54,90%	18,00%	25,00%	37,50%	55,00%	70,00%	70,00%
4	Meningkatnya APM PAUD/TK sebesar 48,85%	15,50%	22,00%	30%	47%	62,00%	62,00%
5	Meningkatnya APK SD/MI/Paket A. sebesar 1,70%	114,2%	114,2%	114,85%	115,20%	115,50%	115,50%
6	Meningkatnya APM SD/MI/Paket A sebesar 0,87%	97,9 %	98,00%	98,10 %	98,35 %	98,50%	98,50%
7	Meningkatnya APK	94,41%	97,50%	98,50%	99,40%	100,0%	100,0%

No	Sasaran SKPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	2015	
	SMP/MTs/Paket B. sebesar 3,80%						
8	Meningkatnya APM SMP/MTs/Paket B. sebesar 6,35%	84,59%	88,20%	91,5 %	93,75% %	94,00%	94,00%
9	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 8,20%	65,50%	69,00%	74,50%	78,5%	85,00%	85,00%
10	Meningkatnya APM SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 24,05%	57,5,5%	61,50%	66,50%	73,00%	80,00%	80,00%
11	100% gedung SD/SDLB; SMP/SMPLB/ SMA/SMK dalam kondisi baik. Naik sebesar 15,04%	86,50%	89,50%	93,50%	97,50%	100,0%	100,0%
12	Meningkatnya Rasio siswa SMA : SMK = 75 : 25	90:10	88: 12	84 : 16	80 : 20	75 : 25	75 : 25
13	Minimal 75% SD/MI memiliki perpustakaan. Naik sebesar 27,84%	50,50%	55,00%	62,00%	71,00%	75,00%	75,00%
14	Minimal 90% SMP/MTs memiliki perpustakaan. Naik sebesar 25,23%	68,75%	72,50%	77,00%	85,00%	90,00%	90,00%
15	100% SMA/SMK memiliki perpustakaan. Naik sebesar 21,43%	80,00%	84,50%	88,50%	94,50%	100,0%	100,0%
16	Minimal 80% SMP/MTs memiliki laboratorium. Naik sebesar 27,73%	55,60%	62,00%	67,00%	74,00%	80,00%	80,00%
17	82% SMA/SMK memiliki laboratorium lengkap. Naik sebesar 40,82%	46,00%	53,00%	58,50%	71,50%	82,0%	82,0%
18	Setiap Kecamatan memiliki sekolah 10% SD SSN. Naik sebesar 27,73%. Naik sebesar 7,87%	4,50%	6,00%	8,50%	10,00%	10,00%	10,00%
19	Meningkatnya Sekolah standar Nasional tingkat SMP 35% sebesar 15,68%	22,50%	24,00%	28,5%	32,00%	35,00%	35,00%
20	Meningkatnya Sekolah standar Nasional tingkat SMA/SMK 50%. sebesar 32,36%	20,75%	24,50%	34,00%	42,50%	50,00%	50,00%
21	Meningkatnya Sekolah Bertaraf Internasional SBI SD 1 % sebesar 0,76%	0,24%	0,47%	0,71%	0,95%	1,00%	1,00%
22	Meningkatnya Sekolah Bertaraf Internasional SBI SMP 2 % sebesar 2,00%	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%
23	Meningkatnya Sekolah Bertaraf Internasional SBI SMA 5 % . sebesar 5,00%	0,00%	2,00%	2,00%	2,00%	5,00%	5,00%
24	Meningkatnya Sekolah bersertifikat sebagai sekolah berwawasan Darussalam	20,00%	50,00%	70,00%	85,00%	100%	100%

No	Sasaran SKPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	2015	
	sebesar 100,00%						
25	Meningkatnya Satu buku teks pelajaran per siswa untuk MP yang di-UN-kan. sebesar 20,00%	85%	90%	100%	100%	100%	100%
26	Diterapkannya 7 jenis dan variasi program PNF beorientasi Life Skill yang didukung pengembangannya. Naik sebesar 4 jenis	4	5	6	7	7	7
27	Lembaga dan program PNF telah terakreditasi, minimal 50% dari jumlah PKBM yang ada.	2	6	8	10	10	10
28	Terbangunnya sistem penjaminan mutu guru dan Kepsek yang membina peserta olimpiade nasional, 2 lembaga	0	0	1	0	2	2
29	Pemberian penghargaan dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 6 jenis Tunjangan tetap diberikan.	6	6	6	6	6	6
30	100% guru berpendidikan minimal S.1 / D.4. Naik sebesar 28,00%	75%	80%	84%	92%	100%	100%
31	SMA/SMK/MA sudah memiliki buku teks yang layak menurut BSNP. Naik sebesar 69,50%	40,00%	55,00%	70,00%	85,00%	100%	100%
32	Pemberdayaan Komite Sekolah . Naik sebesar 100,00%	20%	40%	65%	85%	100%	100%
33	Dimulainya pemanfaatan ICT untuk Pembelajaran. Naik sebesar 25,00%	7,5%	14,00%	17,50%	22,00%	25,00%	25,00%
34	Pangkalan data dan informasi pendidikan berbasis website (padati web) . Naik sebesar 80,00%	30%	100%	100%	100%	100%	100%

C. Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas akan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu;
2. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara;
3. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan melalui jalur formal dan non formal;

4. Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini;
5. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat miskin, perdesaan dan terpencil serta masyarakat penyandang cacat;
6. Menyusun Peraturan Daerah tentang pelajaran budi pekerti, akidah, akhlak dan ibadah sebagai muatan lokal di setiap jenjang pendidikan dalam rangka pembinaan akhlak mulia;
7. Menyediakan materi dan peralatan pendidikan (*teaching and learning materials*) terkini baik yang berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan alam sekitar;
8. Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya dan komitmen dalam melaksanakan tugas pengajaran;
9. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan;
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
11. Meningkatkan pengembangan pendidikan tinggi (Universitas Musi Rawas)
12. Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan.

D. Program Prioritas

Untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka direncanakan program prioritas dan Pagu Indikatif Pendanaan bidang pendidikan selama lima tahun yaitu :

Tabel 8.2
Indikasi Program / Kegiatan Prioritas Pendidikan dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2011-2015

NO	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1	Program PAUD	6235	7380	8395	10380	12263
2	Program Dikdas Dan Wajar 9 Tahun	74194	87774	98378	103324	94565
3	Program Pendidikan Menengah	52551	63501	72592	91122	101252
4	Program Pendidikan Nonformal	1523	1675	1750	1850	1950
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	625	725	830	950	1050

8.2.2 Dinas Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

A. Permasalahan

Angka Kematian Ibu (AKI) sudah mengalami penurunan namun angka tersebut masih jauh dari target MDG's tahun 2015 (102/100.000 KH) sehingga masih diperlukan upaya yang luar biasa untuk mencapai target tersebut. Angka Kematian Bayi (AKB) masih jauh dari target MDG's (23/1.000 KH), kalau dilihat dari potensi untuk menurunkan AKB maka masih *on track* walaupun diperlukan sumber daya manusia yang kompeten.

Beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam pembangunan kesehatan di kabupaten Musi Rawas, antara lain :

1. Pembangunan sarana kesehatan belum didasarkan pada kajian aksesibilitas pada masyarakat sehingga terjadi perbedaan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di setiap wilayah terutama aksesibilitas kualitas pelayanan terhadap kelompok rentan seperti : penduduk miskin, daerah tertinggal dan daerah terpencil.
2. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas.
3. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
4. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
5. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata menyebabkan terjadinya disparitas pelayanan kesehatan antar wilayah.
6. Proporsi pembiayaan kesehatan bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas belum mengutamakan upaya pencegahan, promosi kesehatan, peningkatan pelayanan lansia, peningkatan pelayanan balita dan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Anggaran masih banyak dialokasikan ke prasarana dan sarana.
7. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas.
8. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor.
9. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan.
10. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal.

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan bidang kesehatan, maka ditetapkan sasaran kesehatan selama lima tahun sebagaimana tabel 8.3.

Tabel 8.3
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 - 2015

No	Sasaran SKPD	Target Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatnya persentase obat generik berlogo dalam persediaan obat	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya cakupan desa yang mempunyai obat esensial	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya persentase alkes yang beredar memiliki persyaratan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	75%	80%	85%	95%	100%
5	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0,1%	0,4%	0,8%	1,2%	1,5%
6	Persentase keluarga rawan yang dibina Puskesmas dan jaringannya	75 %	80 %	85 %	90 %	100%
7	Meningkatnya cakupan rawat jalan Puskesmas	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
8	Meningkatnya cakupan rawat inap Puskesmas	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
9	Meningkatnya persentase Sistem penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas kesehatan	80%	85%	90%	95%	100%
10	Meningkatnya Pesentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	80%	85%	90%	95%	100%
11	Meningkatnya persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	80%	85%	90%	95%	100%
12	Meningkatnya persentase rumah sehat	80%	85%	90%	95%	100%
13	Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita	18,00 %	17,50 %	17,00 %	16,00 %	15,00 %
14	Meningkatnya persentase bayi 0 - 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	80%	85%	90%	95%	100%
15	Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	20,00	40,00 %	60,00 %	80,00 %	100%
16	Meningkatnya cakupan balita gizi buruk dirawat	100%	100%	100%	100%	100%
17	Meningkatnya jumlah balita yang ditimbang di Posyandu	80%	85%	90%	95%	100%
18	Meningkatnya jumlah kecamatan bebas rawan gizi	80%	85%	90%	95%	100%
19	Meningkatnya Angka penemuan kasus penderita Tuberkulosis	70%	73%	78%	80%	85%
20	Menurunnya angka kesakitan malaria	12/1000	10/1000	7/1000	5/1000	<5/1000
21	Terkendalinya prevalensi HIV pada penduduk	100%	100%	100%	100%	100%
22	Meningkatnya cakupan Angka kesakitan demam berdarah yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
23	Meningkatnya penemuan penderita pneumonia balita	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran SKPD	Target Capaian Setiap Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
24	Meningkatnya Cakupan penemuan Diare	100%	100%	100%	100%	100%
25	Pelacakan kasus kontak AFP / luimpuh layu	2,1	2,0	< 2	< 2	< 2
26	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0 - 11 bulan	92,00 %	94,00 %	96,00 %	98,00 %	100%
27	Meningkatnya Cakupan Desa/Kelurahan UCI	92,00 %	94,00 %	96,00 %	98,00 %	100%
28	Cakupan Penyelidikan KLB < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%
29	Persentase desa menerapkan sistem kewaspadaan dini (Laporan W1)	87%	90%	95%	97%	100%
30	Meningkatnya Puskesmas yang melaksanakan PONED	25,00 %	45,00 %	65,00 %	85,00 %	100%
31	Meningkatnya cakupan pelayanan ibu nifas	91,70 %	91,85 %	91,90 %	92,00 %	92,00 %
32	Meningkatnya cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
33	Meningkatnya cakupan kunjungan bayi	90,80 %	91,00 %	91,50 %	92,00 %	92,00 %
34	Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal lengkap	92,00 %	93,00 %	94,00 %	95,00 %	95,00 %
35	Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4	92,00 %	93,00 %	94,00 %	95,00 %	95,00 %
36	Meningkatnya Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	91,70 %	91,85 %	91,90 %	92,00 %	92,00 %
37	Meningkatnya cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
38	Meningkatnya cakupan pelayanan balita	50,00 %	60,00 %	70,00 %	80,00 %	90%
39	Meningkatnya cakupan desa yang mempunyai 2 kader terlatih	100%	100%	100%	100%	100%
40	Meningkatnya cakupan penjarangan siswa SD dan setingkat	60,00 %	70,00 %	80,00 %	90%	100%
41	Meningkatnya cakupan Desa Siaga	100%	100%	100%	100%	100%
42	Meningkatnya cakupan Desa Siaga Aktif	15,00%	30,00%	50,00%	75,00%	100%
43	Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS	60%	70%	80%	90%	100%
44	Meningkatnya persentase sekolah dasar ber PHBS	40%	50%	60%	70%	80%
45	Meningkatnya persentase fasilitas pemerintah ber PHBS	80%	85%	90%	95%	100%
46	Meningkatnya persentase tempat kerja ber PHBS	30%	40%	50%	60%	70%
47	Meningkatnya persentase Tempat Umum ber PHBS	50%	60%	70%	80%	90%
48	Meningkatnya persentase data program kesehatan yang up to date, valid, lengkap dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%
49	Tersedianya informasi yang evidence based	100%	100%	100%	100%	100%
50	Meningkatnya cakupan desa yang mempunyai bidan	100%	100%	100%	100%	100%

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan kesehatan adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas terutama di daerah kurang diminati dan rawan bencana.
3. Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin.
4. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup bersih dan sehat.
5. Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini.
6. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan kesehatan.
7. Penataan dan pengembangan sistem informasi kesehatan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi kesehatan melalui pengaturan sistem informasi yang komprehensif dan pengembangan jejaring.
8. Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif.
9. Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk mencapai indikator SPM.
10. Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran.

D. Program

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun rencana program prioritas dan pagu indikatif pendanaan sebagai mana tabel 8.4

Tabel 8.4
Indikasi Program Prioritas Dinas Kesehatan dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program obat dan Perbekalan Kesehatan	169,467	200,5	210,625	221,3	232,342
2	Program pengawasan obat dan makanan	334,072	297,996	492,209	522,634	555,174
3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4820,185	5201,244	2199,529	5453,52	5596,588
4	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	128,727	141,598	155,759	171,335	188,418
5	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	606,713	677,666	691,254	698,727	706,575
6	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	18442,02	11102	12025	12321	13903
7	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru rumah sakit mata	7763,946	150	665	183	820
8	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	1323,006	0	0	0	0
9	Program perbaikan gizi masyarakat	1761,475	1834,725	1799,725	1799,725	1824,725

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
10	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1240,38	1204,05	1297,66	1368,55	1427,081
11	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	66,199	69,509	72,984	76,633	80,465
12	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	74,969	101,817	106,79	112,129	117,726
13	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	200,925	210,971	221,520	232,596	244,225
14	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	578,308	566,788	597,569	631,666	666,278
15	Program pengembangan data / informasi	1461,062	1444,023	1478,226	1519,077	1419,145
16	Program perencanaan pembangunan daerah	164,554	81,010	199,111	219,022	240,924
17	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	2206,168	1520,659	1072,127	918,981	793,728

8.2.3 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan daerah. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik. Infrastruktur yang akan menjadi perhatian dalam Bab ini, adalah prasarana/sarana jalan; prasarana perhubungan, yang meliputi angkutan darat, perkeretaapian, dan angkutan sungai.

A. Permasalahan

Berbagai permasalahan perasaan/sarana jalan yang dihadapi adalah :

1. Kondisi jaringan jalan poros desa, jalan kabupaten, dan jalan provinsi di dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan, yang disebabkan oleh kualitas konstruksi jalan yang belum optimal, pembenahan berlebihan, akibat alam serta menurunnya kemampuan pembiayaan pemeliharaan.
2. Tingkat kerusakan jalan akibat pembenahan muatan lebih dan sistem penanganan yang belum memadai, berakibat pada hancurnya jalan sebelum umur teknis sosial ekonomi.
3. Banyaknya kerusakan prasarana jalan akibat bencana alam, menyebabkan alokasi dana yang semula untuk pemeliharaan jalan berubah untuk penanggulangan tanggap darurat.
4. Perbedaan yang signifikan antara jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan jaringan jalan dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
5. Kinerja pelayanan prasarana jalan yang didasarkan atas kecepatan yang mampu dicapai kendaraan masih rendah.
6. Menurunnya tingkat pelayanan prasarana jalan.
7. Sistem jaringan jalan belum terhubung seluruhnya dalam Kabupaten Musi Rawas.
8. Mekanisme pendanaan dan penanganan jalan provinsi, kabupaten dan desa belum jelas bahkan masih mengacu kepada batas-batas administrasi wilayah, sehingga berdampak kepada sistem jaringan jalan yang belum membentuk suatu jaringan transportasi intermoda yang terpadu.
9. Rendahnya sumber-sumber pembiayaan baik pembangunan baru maupun pemeliharaan jalan dan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan prasarana jalan

dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan yang ada, dan mencari terobosan sumber-sumber pendanaan dari masyarakat atau swasta

10. Belum terhubungnya berbagai kawasan rencana pengembangan agropolitan.

B. Sasaran

Sasaran umum pembangunan prasarana / sarana jalan adalah: (1) Terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat; (2) Meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang melalui dukungan pelayanan prasarana jalan khususnya pada koridor-koridor utama di masing-masing kawasan Agropolitan dan perdesaan; dan (3) Terwujudnya partisipasi aktif pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan. Rencana target capaian kinerja Dinas PU bina Marga data dilihat pada tabel 8.5.

Tabel 8.5
Rencana Target Capaian Kinerja Dinas PU Bina Marga Tahun 2011-2015

No.	Sasaran SKPD	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatnya rasio panjang jalan yang kondisinya baik dari 26,4 % (tahun 2009) menjadi 40 % (tahun 2015)	100,36 Km	100,36 Km	80,29 Km	60,22 Km	60,22 Km
2	Meningkatnya rasio paanjang jembatan yang ekondisinya baik sekarang 3 % pertahun	12 Buah	12 Buah	12 Buah	12 Buah	13 Buah
3	Meningkatnya rasio pemeliharaan/rehabilitasi jembatan yang kondisinya baik dari 15% per tahun	132,83 Km`	147,88 Km	159,92 Km	168,96 Km	177,99 Km
4	Meningkatkan rasioo pemeliharaan/rehabilitasi jembatan yang kondisinya baik sebesar 2 % per tahun	8 buah	8 buah	8 buah	8 buah	8 buah
5	Meningkatnya rasio sarana dan prasarana kebinamargaan yang kondisinya baik menjadi 90 % pada tahun 2015	15%	25%	25%	25%	10%
		15%	25%	25%	25%	10%

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan prasarana / sarana jalan adalah: (1) mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan; (2) mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Musi Rawas dan kawasan cepat tumbuh di agropolitan center dan agropolitan distrik; (3) melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan; (4) mengembangkan rencana induk sistem jaringan prasarana jalan berbasis kawasan, khususnya agropolitan center dan agropolitan distrik; (5) menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan; dan (6) mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.

D. Program

Untuk meningkatkan kinerja pencapaian sasaran Dinas PU Bina Marga dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, disusun prioritas program dengan pendanaan sebagaimana tabel 8.6

Tabel 8.6
Indikasi Program Prioritas Dinas PU Bina Marga dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pembangunan Jalan	80500	92000	89500	64500	64500
2	Program Pembangunan Jembatan	44413	34413	42213	33880	33880
3	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	150000	150000	150000	150000	150000
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina Margaan	1050	3050	3050	2550	50

8.2.4 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

A. Permasalahan

Permasalahan yang ada pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Musi Rawas adalah :

1. Menurunnya fungsi jaringan irigasi yang sudah di bangun dan kurang optimalnya tingkat layanan tata guna air dikarenakan belum semua jaringan irigasi dapat ditingkatkan dan dilakukan pemeliharaan
2. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi
3. Belum optimalnya koordinasi kelembagaan bidang pengairan
4. Rusaknya daerah aliran sungai (DAS) di bagian hulu yang timbul akibat bencana alam
5. Belum dimanfaatkannya potensi pengembangan irigasi skala besar
6. Rendahnya tingkat kemampuan SDM di bidang pengairan

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan pada sektor pengairan, maka direncanakan sasaran dengan target selama lima tahun sebagai berikut :

Tabel 8.7
Rencana Target Capaian Kinerja Dinas PU Pengairan Tahun 2011-2015

No	Sasaran	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatnya persentase jaringan irigasi yang kondisinya baik terhadap jaringan yang ada menjadi 80% pada tahun 2015	48%	56%	64%	72%	80%
2	Bertambahnya jumlah aset jaringan irigasi untuk pengembangan daerah irigasi skala besar	0 ha	160 ha	235 ha	238,87 ha	0 ha
3	Meningkatnya jumlah aset irigasi	15 D.I	37 D.I	37 D.I	37 D.I	37 D.I

No	Sasaran	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
	yang terkelola dari 22 daerah irigasi menjadi 37 daerah irigasi pada tahun 2015					
4	Terjaminnya keberlanjutan ketersediaan air irigasi sebanyak 13 daerah irigasi pada tahun 2015	3 D.I	3 D.I	3 D.I	3 D.I	1 D.I
5	Meningkatnya jumlah daerah konservasi dan normalisasi sungai sebanyak 10 sungai pada tahun 2015	4 Sungai	3 Sungai	3 Sungai	-	-
6	Meningkatnya jumlah saluran irigasi dari 189,00 Km menjadi sepanjang 284,85 Km pada tahun 2015	10,85 Km	26,50 Km	26,5 Km	17,00 Km	15,00 Km
7	Meningkatnya jumlah pengelolaan sistem irigasi partisipatif dari 2 daerah irigasi menjadi 7 daerah pada tahun 2010	1 D.I	1 D.I	1 D.I	1 D.I	1 D.I
8	Terpeliharanya fungsi jaringan irigasi yang ada dengan operasi dan pemeliharaan sebanyak 22 daerah irigasi pada tahun 2015	22	22	22	22	22
9	Meningkatnya jumlah SDM bidang pengairan yang berkualitas dari 10 orang menjadi 110 orang pada tahun 2015	20	20	20	20	20

C. Arah Kebijakan

Pembangunan irigasi diarahkan untuk meningkatkan produktifitas pertanian, sehingga pembangunan irigasi dimantapkan seiring dengan pertumbuhan agribisnis dan pengembangan irigasi teknis semakin dimantapkan dengan strategi sebagai berikut :

1. Pengelolaan pelestarian dan pengembangan sumberdaya air secara berkelanjutan serta membudayakan masyarakat untuk hemat air.
2. Pengelolaan peningkatan pelayanan tata guna air untuk mendukung usaha masyarakat di sektor pertanian dan usaha lainnya.
3. Pengelolaan pembinaan kelembagaan, pemberdayaan dan peningkatan SDM di bidang pengairan
4. Pengelolaan peningkatan fasilitas dan koordinasi pengembangan irigasi skala besar (Air Lakitan dan Air Rawas)

D. Program

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan prioritas program sebagaimana tabel 8.8.

Tabel 8.8
Indikasi Program Prioritas dinas PU Pengairan dan
Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program pengendalian banjir	6.600	8.300	4.000	3.700	0
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawas dan Jaringan Pengairan Lainnya	57525	45800	40700	25925	23175

8.2.5 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Hal yang paling mendasar dalam bidang Tata Ruang di Kabupaten Musi Rawas adalah belum tersedianya payung hukum yang memadai tentang Tata Ruang. Peraturan perundangan yang ada menyangkut tata ruang masi dalam proses penyelesaian yaitu RT RW Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 – 2028. Sebagai konsekwensi keterbatasan payung hukum tersebut, maka pembangunan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Musi Rawas sering dilakukan tanpa mengikuti kaidah tata ruang, tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta tidak memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam.

A. Permasalahan

Ketiadaan payung hukum , menyebabkan kesulitan dalam menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang. Banyak ruang tereksplorasi berlebihan yang mesti ditertibkan oleh pemerintah daerah. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-undang 24 tahun 1992, membawa perubahan yang cukup mendasar bagi pelaksanaan kegiatan penataan ruang, salah satunya pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang, selain pemberian insentif dan disinsentif juga pemberian sanksi yang merupakan salah satu upaya sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pemberian sanksi ini tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perijinan pemanfaatan ruang, tetapi juga dikenakan kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Diharapkan rencana tata ruang segera tersusun dan dapat dijadikan pedoman untuk:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten
4. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi

B. Sasaran

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka ditetapkan sasaran dan target kinerja selama lima tahun yaaitu:

Tabel 8.9
Rencana Target Capaian Kinerja Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2011-2015

No	Sasaran SKPD	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	201	2013	2014	2015
1	Meningkatnya Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL dari 16 dokumen Pada tahun 2011 menjadi 58 dokumen Pada tahun 2015	16 dok	11 dok	11 dok	11 dok	9 dok
2	Meningkatnya Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 5 dokumen Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
3	Meningkatnya Penyusunan rencana tata ruang wilayah terhadap total kebutuhan dari 100% Pada tahun 2011 menjadi 100% Pada tahun 2015	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan dari 4 dokumen Pada tahun 2011 menjadi 16 dokumen Pada tahun 2015	4 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok
5	Meningkatnya Penyusunan rencana teknis ruang kawasan dari 6 dokumen Pada tahun 2011 menjadi 21 dokumen Pada tahun 2015	6 dok	4 dok	4 dok	4 dok	3 dok
6	Meningkatnya Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan dari 6 dokumen Pada tahun 2011 menjadi 21 Pada tahun 2015	6 dok	4 dok	4 dok	4 dok	3 dok
7	Meningkatnya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW dari 4 dokumen Pada tahun 2011 menjadi 20 Pada tahun 2015	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok
8	Meningkatnya Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 5 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
9	Meningkatnya Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 5 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
10	Meningkatnya Revisi rencana tata ruang dari 4 dokumen Pada tahun 2011 menjadi 20 Pada tahun 2015	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok
11	Meningkatnya Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang dari 4 Pada tahun 2011 menjadi 20 Pada tahun 2015	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok
12	Meningkatnya Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang dari 4 Pada tahun 2011 menjadi 20 Pada tahun 2015	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok
13	Meningkatnya Survey dan pemetaan dari 16 kali Pada tahun 2011 menjadi 58 kali Pada tahun 2015	16 kali	11 kali	11 kali	11 kali	9 kali
14	Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 5 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
15	Meningkatnya Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang dari 4 dokumen Pada tahun 2011 menjadi 20 dokumen Pada tahun 2015	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok
16	Meningkatnya Penyusunan kebijakan	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok

No	Sasaran SKPD	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	201	2013	2014	2015
	pengendalian pemanfaatan ruang dari 4 dokumen Pada tahun 2011 menjadi 20 dokumen Pada tahun 2015					
17	Meningkatnya Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 5 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
18	Meningkatnya Survey dan pemetaan dari 4 kali Pada tahun 2011 menjadi 20 kali Pada tahun 2015	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok
19	Meningkatnya Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang dari 3 kali Pada tahun 2011 menjadi 15 kali Pada tahun 2015	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
20	Meningkatnya Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 5 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
21	Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 5 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
22	Meningkatnya Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dari 4 dokumen Pada tahun 2011 menjadi 20 dokumen Pada tahun 2015	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok
23	Meningkatnya Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang dari 4 dokumen Pada tahun 2011 menjadi 20 dokumen Pada tahun 2015	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok
24	Meningkatnya Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 5 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
25	Meningkatnya Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dari 3 kali Pada tahun 2011 menjadi 15 kali Pada tahun 2015	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
26	Meningkatnya Pengawasan pemanfaatan ruang dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 5 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
27	Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 5 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
28	Meningkatnya Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 5 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pengelolaan tata ruang adalah; perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukungnya.

D. Program

Untuk mencapai sasaran dalam lima tahun ke depan ditetapkan prioritas program dan Pagu Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 8.10
Pagu Indikatif PU Cipta Karya dan Tata Ruang 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Perencanaan Tata Ruang	2625	2625	2625	2625	2625
2	Program Pemanfaatan Ruang	1225	1225	1225	1225	1225
3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	925	925	925	925	925

8.2.6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan merupakan dapur perencanaan yang sangat strategis, Bappeda sebagai institusi perencanaan memadukan perencanaan mikro dengan makro.

A. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan :

1. Kecilnya ketersediaan dana untuk belanja langsung, sementara itu usulan jauh lebih tinggi.
2. Seringnya pergantian pegawai pada SKPD menyebabkan kurangnya tugas perencanaan yang memahami tupoksi

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun adalah :

Tabel 8.11
Rencana Target Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2011-2015

No	Sasaran	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Terpenuhinya kebutuhan data/informasi/statistik daerah	4 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		11 dok	3 dok	4 dok	3 dok	7 dok
2	Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	11 dok	3 dok	4 dok	3 dok	7 dok
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kajian dan penelitian	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
3		-	1 jenis	-	-	-
4	Meningkatnya sinkronisasi program renstra SKPD dengan program RPJMD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya sinkronisasi program RKPd dengan program renja SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Meningkatnya sinkronisasi program RKA SKPD dengan program renja SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Meningkatnya koordinasi bidang data dan litbang	35 kali	35 kali	35 kali	35 kali	35 kali
9	Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang ekonomi	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali

No	Sasaran	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
9	Meningkatnya koordinasi pokja agropolitan	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali
10	Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya	40 kali	40 kali	40 kali	40 kali	40 kali
11	Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang fisik dan infrastruktur	104 kali	104 kali	104 kali	104 kali	104 kali
12	Meningkatnya koordinasi program pamsimas	60 kali	60 kali	60 kali	60 kali	60 kali
13	Meningkatnya kualitas SDM aparatencana pembangunan	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan penataan ruang, salah satunya pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang, selain pemberian insentif dan disinsentif juga pemberian sanksi yang merupakan salah satu upaya sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pemberian sanksi ini tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perijinan pemanfaatan ruang, tetapi juga dikenakan kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

D. Program

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun prioritas program dan pagu pendanaan sebagai berikut:

Tabel 8.12
Indikasi Program / Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan Bappeda
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
01	Program Pengembangan data/informasi	1893	740	795	850	930
02	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	110	110	110	110	110
03	Program perencanaan pembangunan daerah	1210	870	930	990	1710
04	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1290	700	775	775	1300
05	Program perencanaan sosial budaya	638	650	775	850	1000
06	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1075	1125	1175	1225	1275

8.2.7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

A. Permasalahan

Prasarana / sarana komunikasi. Permasalahan yang dihadapi adalah: (1) kondisi fisik Kabupaten Musi Rawas yang sangat beragam; (2) masih terbatasnya jangkauan jaringan komunikasi; dan belum berkembangnya pemanfaatan sistem teknologi informasi.

Prasarana / Sarana Perhubungan. Permasalahan yang dihadapi adalah: (1) rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan; (2) belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan perdesaan; (3) masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih; (4) kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum dan perkeretaapian masih terbatas; (5) masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada, rambu dan fasilitas keselamatan di jalan baik darat maupun perkeretaapian dan angkutan sungai, *law enforcement* peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas; (6) rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan; (7) masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan; (8) masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ; (9) peningkatan pembinaan teknis transportasi di daerah, sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, dibuat sistem standar pelayanan minimal dan standar teknis di bidang LLAJ serta skema untuk peningkatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan LLAJ di daerah; (10) masih rendahnya kapasitas penyediaan angkutan kereta api, baik barang maupun penumpang; (11) masih terbatasnya jumlah prasarana dan sarana angkutan sungai; (12) masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi Sungai dengan rencana pengembangan wilayah; dan (13) terbatasnya keterjangkauan pelayanan Angkutan Sungai.

B. Sasaran

Untuk memecahkan permasalahan tersebut di atas, maka disusun sasaran beserta rencana capaian target kinerja sebagai berikut;

Tabel 8.13
Rencana Target Capaian Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

No	Sasaran SKPD	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan dari 5 Pada tahun 2011 menjadi 22 Pada tahun 2015	5 dok	4 dok	4 dok	4 dok	5 dok
2	Meningkatnya Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan dari 1 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
3	Meningkatnya Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan dari 20 Pada tahun 2011 menjadi 125 Pada tahun 2015	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali
4	Meningkatnya Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan dari 5 Pada tahun 2011 menjadi 60 Pada tahun 2015	5 kali	10 kali	15 kali	15 kali	15 kali
5	Meningkatnya pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan terhadap total kebutuhan dari 2 Pada tahun 2011 menjadi 6 Pada tahun 2015	2 %	3 %	4 %	5 %	6 %
6	Meningkatnya pengelolaan terminal angkutan darat terhadap total kebutuhan dari 3 Pada tahun 2011 menjadi 7 Pada tahun 2015	3 %	4 %	5 %	6 %	7 %
7	Meningkatnya Pembangunan gedung terminal Dari 3 Pada tahun 2011 menjadi 5 Pada tahun 2015	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

No	Sasaran SKPD	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
8	Meningkatnya Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal dari 4 Pada tahun 2011 menjadi 22 Pada tahun 2015	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
9						
10	Meningkatnya Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah
11	Meningkatnya Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah
12	Meningkatnya Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dari 30 unit Pada tahun 2011 menjadi 150 unit Pada tahun 2015	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit
13	Meningkatnya Pengadaan marka jalan dari 1.900 m ² Pada tahun 2011 menjadi 11.400 m ² Pada tahun 2015	1.900m ²	1.900m ²	3800m ²	1.900m ²	1.900m ²
14	Meningkatnya Pengadaan pagar pengaman jalan dari 30 m Pada tahun 2011 menjadi 160 m Pada tahun 2015	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
15	Meningkatnya Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor dari 1 unit Pada tahun 2011 menjadi 1 unit Pada tahun 2015	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit
16	Meningkatnya Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor dari 1 unit Pada tahun 2011 menjadi 1 unit Pada tahun 2015	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit
17	Meningkatnya Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor dari 4 kali Pada tahun 2011 menjadi 20 kali Pada tahun 2015	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
18	Meningkatnya Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang dari 2 kali Pada tahun 2011 menjadi 16 kali Pada tahun 2015	2 kali	3 kali	4 kali	3 kali	4 kali
19	Meningkatnya Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan dari 2 kali Pada tahun 2011 menjadi 14 kali Pada tahun 2015	2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
20	Meningkatnya Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 5 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
21	Meningkatnya Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang dari 3.370 kali Pada tahun 2011 menjadi 18.100 kali Pada tahun 2015	3.370 kali	3.495 kali	3.620 kali	3.745 kali	3.870 kali
22	Meningkatnya Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya dari 2 kali Pada tahun 2011 menjadi 14 kali Pada tahun 2015	2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
23	Meningkatnya Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal dari 2 kali Pada tahun 2011 menjadi 14 kali Pada tahun 2015	2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
24	Meningkatnya Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama dari 20 kali Pada tahun 2011 menjadi 100 kali Pada tahun 2015	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali
25	Meningkatnya Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum dari	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali

No	Sasaran SKPD	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
	20 kali Pada tahun 2011 menjadi 100 Pada tahun 2015					
26	Meningkatnya Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal dari 20 kali Pada tahun 2011 menjadi 100 kali Pada tahun 2015	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali
27	Meningkatnya Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah dari 20 kali Pada tahun 2011 menjadi 100 kali Pada tahun 2015	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali
28	Meningkatnya Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkutan dari 1 dokumen Pada tahun 2011 menjadi 1 dokumen Pada tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
29	Meningkatnya Fasilitas perijinan di bidang perhubungan dari 376 kali Pada tahun 2011 menjadi 2.180 kali Pada tahun 2015	376 kali	406 kali	436 kali	466 kali	496 kali
30	Meningkatnya Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan dari 2 kali Pada tahun 2011 menjadi 14 kali Pada tahun 2015	2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
31	Meningkatnya Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 5 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
32	Meningkatnya Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan dari 2 kali Pada tahun 2011 menjadi 14 kali Pada tahun 2015	2 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
33	Meningkatnya Fasilitas penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 1 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
34	Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dari 40 kali Pada tahun 2011 menjadi 200 kali Pada tahun 2015	40 kali	40 kali	40 kali	40 kali	40 kali
35	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 5 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
36	Meningkatnya Pengadaan alat studio dan komunikasi terhadap total kebutuhan dari 1 unit Pada tahun 2011 menjadi 1 unit Pada tahun 2015	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit
37	Meningkatnya Pengkajian dan pengembangan sistem informasi dari 1 dok Pada tahun 2011 menjadi 1 dok Pada tahun 2015	1 dok	0 dok	0 dok	0 dok	0 dok
38	Meningkatnya Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi dari 1 dok Pada tahun 2011 menjadi 1 dok Pada tahun 2015	1 dok	0 dok	0 dok	0 dok	0 dok
39	Meningkatnya Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi dari 1 dok Pada tahun 2011 menjadi 1 dok Pada tahun 2015	1 dok	0 dok	0 dok	0 dok	0 dok

No	Sasaran SKPD	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
40	Meningkatnya Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi dari 10 kali Pada tahun 2011 menjadi 30 kali Pada tahun 2015	10 kali	0 kali	10 kali	0 kali	10 kali
41	Meningkatnya Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dari 57 kali Pada tahun 2011 menjadi 1.165 kali Pada tahun 2015	57 kali	277 kali	277 kali	277 kali	277 kali
42	Meningkatnya Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap total kebutuhan dari 57 kali Pada tahun 2011 menjadi 1.165 kali Pada tahun 2015	57 kali	277 kali	277 kali	277 kali	277 kali
43	Meningkatnya Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat terhadap total kebutuhan dari 57 kali Pada tahun 2011 menjadi 1.165 kali Pada tahun 2015	57 kali	277 kali	277 kali	277 kali	277 kali

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil di antaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterisolasian informasi (kesenjangan digital)
2. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi
3. Pengembangan Bandara Silampari
4. Pembangunan jaringan rel kereta api dan terminal peti kemas
5. Pengembangan sistem transportasi sungai
6. Peningkatan sarana jalan
7. Menggandakan bantuan sarana transportasi yang murah
8. Pengembangan terminal di distrik agropolitan

D. Program

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut di atas ditetapkan program prioritas sebagai berikut :

Tabel 8.14
Pagu Indikatif Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
01	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	85	110	110	110	110
02	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	-	15	15	15	15
03	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	177	200	220	221	227
04	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	5500	550	600	675	725
05	Program Peningkatan dan Penanganan Lalu	490	460	470	460	460

	Lintas					
06	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	5500	550	600	675	725
07	Program Peningkatan dan Penanganan Lalu Lintas	490	460	470	460	460
08	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	10	370	10	15	15
09	Program Rehabilitasi dan Peeliharaan Prasarana dan Fasilitas Sungai dan Kereta Api	10000	22000	40000	200000	30000
10	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Sungai	520	20	20	0	0
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	125	325	25	0	375
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	15	15	15	-	-
13	Program Pengembangan Bandara Silampari	34950	39725	19950	17300	15525
14	Program Pemeliharaan/Rehabilitasi/Kalibrasi Fasilitas Bandara	520	520	520	520	520
15	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan	10550	11575	1575	1900	1900
16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	988700	112504 0	595040	810045	740050
17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi	78	-	90	-	100
18	Program Kerjasama Informasi dan Media Masa	104	105	120	130	140

8.2.8 Badan Lingkungan Hidup Daerah

Sumberdaya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumberdaya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal dasar pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Hingga saat ini, sumberdaya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian daerah, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah.

Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumberdaya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka menengah (2011 - 2015).

A. Permasalahan

Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar. Beberapa permasalahan pokok dapat digambarkan berikut ini:

1. Terus menurunnya kondisi hutan. Hutan merupakan salah satu sumberdaya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian daerah tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dunia. Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah yang mempunyai hutan cukup luas di Sumatera Selatan, karena 251.252 hektar luas hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) berada di daerah ini;
2. Akan dikembangkannya berbagai program pembangunan skala besar yang jika tidak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan justru akan merusak dan

mencemari lingkungan seperti Pengembangan Agropolitan, Pembangunan Terminal Peti Kemas, Pembangunan Pembangkit Listrik di mulut tambang; Pembangunan Irigasi Skala Besar; Pengembangan Ibukota Kabupaten, dll;

3. Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai) akibat penebangan liar dan pemanfaatan sumberdaya lahan yang tidak bijaksana;
4. Belum ada studi AMDAL beberapa kegiatan pembangunan;
5. Citra pertambangan yang merusak lingkungan. Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (*open mining*), selalu mengubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya, seperti Eks-BTM tambang mas.
6. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*).
7. Pencemaran air semakin meningkat dan kualitas udara semakin menurun;
8. Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan;
9. Lemahnya penegakan hukum terhadap penebangan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu;
10. Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa-jasa lingkungan. Hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan dari ekosistem hutan, seperti nilai hutan sebagai sumber air, keanekaragaman hayati, udara bersih, keseimbangan iklim, keindahan alam, dan kapasitas asimilasi lingkungan yang memiliki manfaat besar sebagai penyangga sistem kehidupan, dan memiliki potensi ekonomi, belum berkembang seperti yang diharapkan; Terjadinya penurunan kontribusi migas dan hasil tambang pada penerimaan daerah.
11. Adaptasi kebijakan terhadap perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) belum dilaksanakan;
12. Alternatif pendanaan lingkungan belum dikembangkan;
13. Isu lingkungan global belum dipahami dan diterapkan dalam pembangunan daerah;
14. Belum diterapkannya peraturan lingkungan hidup dan Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.

B. Sasaran

Sasaran pembangunan dan pengembangan sumberdaya alam adalah membaiknya sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas. Secara khusus sasaran pembangunan dan pengembangan sumberdaya alam diuraikan berikut ini.

Sasaran pembangunan lingkungan hidup adalah: (1) meningkatnya kualitas air permukaan (sungai, danau dan situ) dan kualitas air tanah disertai pengendalian dan pemantauan terpadu antar sektor; (2) meningkatnya kualitas udara yang didukung oleh perbaikan manajemen dan sistem transportasi yang ramah lingkungan; (3) berkembangnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim global; (4) kelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; (5) meningkatnya upaya pengelolaan sampah perkotaan dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai salah satu faktor penentu kebijakan; (6) tersusunnya informasi dan peta wilayah-wilayah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, bencana banjir, kekeringan dan gempa bumi serta bencana alam lainnya; (7) tersusunnya aturan pendanaan lingkungan yang inovatif sebagai terobosan untuk mengatasi rendahnya pembiayaan sektor lingkungan hidup; dan

(8) meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Tabel 8.15
Rencana Target Capaian Kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

No	Sasaran SKPD	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatnya Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah dari 1 dokumen Pada tahun 2011 menjadi 5 dokumen Pada tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
2	Meningkatnya Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dari 3. buah Pada tahun 2011 menjadi 15 buah. Pada tahun 2015	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah	3 buah
3	Meningkatnya Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan dari 1 dokumen ada tahun 2011 menjadi 5 dokumen pada tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
4	Meningkatnya Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dari 5 buah pada tahun 2011 menjadi 9 buah pada tahun 2015	5 buah	6 buah	7 buah	8 buah	9 buah
5	Meningkatnya Pengembangan teknologi pengolahan persampahan dari 0 unit pada tahun 2011 menjadi 4 unit pada tahun 2015	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
6	Meningkatnya Bimbingan teknis persampahan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 2 kali pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	2. kali	2 kali
7	Meningkatnya Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 2 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	2. kali	2 kali
8	Meningkatnya Kerjasama pengelolaan persampahan dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 1 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
9	Meningkatnya Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 1 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
10	Meningkatnya Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 1 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
11	Meningkatnya Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 1 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
12	Meningkatnya Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 1 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
13	Meningkatnya Koordinasi penilaian langit biru dari 1 kali Pada tahun 2011 menjadi 1 kali Pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
14	Meningkatnya Pemantauan Kualitas Lingkungan dari 2 dokumen pada tahun 2011 menjadi 4 dokumen pada tahun 2015	2 dok	3 dok	3 dok	4 dok	4 dok
15	Meningkatnya Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dari 20 dokumen Pada tahun 2011 menjadi 24 dokumen Pada tahun 2015	20 dok	20 dok	24 dok	24 dok	24 dok
16	Meningkatnya Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dari 0 Pada	0 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok

No	Sasaran SKPD	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
	tahun 2011 dokumen menjadi 10 dokumen Pada tahun 2015					
17	Meningkatnya Pengelolaan B3 dan Limbah B3 dari 10 dokumen pada tahun 2011 menjadi 14 dokumen pada tahun 2015	10 dok	10 dok	10 dok	14 dok	14 dok
18	Meningkatnya Pengkajian dampak lingkungan dari 4 dokumen pada tahun 2011 menjadi 5 dokumen pada tahun 2015	4 dok	4 dok	5 dok	5 dok	5 dok
19	Meningkatnya Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan dari 0 dokumen pada tahun 2011 menjadi 14 dokumen pada tahun 2015	0 dok	10 dok	12 dok	12 dok	14 dok
20	Meningkatnya peringkat kinerja perusahaan (proper) dari 0 dokumen pada tahun 2011 menjadi 24 dokumen pada tahun 2015	0 dok	20 dok	24 dok	24 dok	24 dok
21	Meningkatnya Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 2 kali pada tahun 2015	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
22	Meningkatnya Pengembangan produksi ramah lingkungan dari 0 kali pada tahun 2011 menjadi 1 kali pada tahun 2015	0 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
23	Meningkatnya Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 3 dokumen pada tahun 2015	1 dok	2 dok	2 dok	3 dok	3 dok
24	Meningkatnya Koordinasi penyusunan AMDAL dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 4 kali pada tahun 2015	2 kali	3 kali	3 kali	4.kali	4 kali
25	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 2 kali pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	2 kali	2 .kali
26	Meningkatnya Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif dari 0 dokumen pada tahun 2011 menjadi 2 dokumen pada tahun 2015	0 dok	1 dok	1 dok	2 dok	2 dok
27	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 2 kali pada tahun 2015	2 kali	2.kali	2 kali	2 kali	2 kali
28	Meningkatnya Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan dari 1000 m ² pada tahun 2011 menjadi 2000 m ² pada tahun 2015	1000 m ²	1000 m ²	1.500 m ²	1.000.m ²	2.000 m ²
29	Meningkatnya Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 2 dokumen pada tahun 2015	1 dok	1 dok	2 dok	2 dok	2 dok
30	Meningkatnya Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan dari 3 dokumen pada tahun 2011 menjadi 3 dokumen pada tahun 2015	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok
31	Meningkatnya Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air dari 500 m ² pada tahun 2011 menjadi 2.500 m ² pada tahun 2015	500 m ²	500 m ²	500 m ²	500 m ²	500 m ²
32	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA dari 10.000 m ² pada tahun 2011 menjadi 50.000 m ² pada tahun 2015	10.000 m ²	10.000 m ²	10.000 m ²	10.000 m ²	10.000 m ²
33	Meningkatnya Koordinasi pengelolaan konservasi SDA dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 2 kali pada tahun 2015	2 kali	2 .kali	2 .kali	2 .kali	2 .kali

No	Sasaran SKPD	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
34	Meningkatnya Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem dari 0 dokumen pada tahun 2011 menjadi 1 dokumen pada tahun 2015	0 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
35	Meningkatnya Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 1 kali pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
36	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 1 kali pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
37	Meningkatnya Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 2 kali pada tahun 2015	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
38	Meningkatnya Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 1 dokumen pada tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
39	Meningkatnya Rehabilitasi hutan dan lahan dari 8.000 ha pada tahun 2011 menjadi 12.000 ha pada tahun 2015	8.000 ha	9.000 ha	10.000 ha	11.000 ha	12.000 ha
40	Meningkatnya Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 1 kali pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
41	Meningkatnya Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 2 kali pada tahun 2015	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
42	Meningkatnya Pengembangan data dan informasi lingkungan dari 30 dokumen pada tahun 2011 menjadi 35 dokumen pada tahun 2015	30 dok	30 dok	30 dok	35 dok	35 dok
43	Meningkatnya Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 1 dokumen pada tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
44	Meningkatnya Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah dari 4 buah pada tahun 2011 menjadi 6 buah Pada tahun 2015	4 buah	4 buah	4 buah	6 buah	6 buah
45	Meningkatnya Pengujian emisi kendaraan bermotor dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 2 kali pada tahun 2015	0 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
46	Meningkatnya Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 2 kali pada tahun 2015	0.kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
47	Meningkatnya Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair dari 0 kali pada tahun 2011 menjadi 2 kali pada tahun 2015	0 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
48	Meningkatnya Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi dari 0 unit pada tahun 2011 menjadi 1 unit pada tahun 2015	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	0Unit
49	Meningkatnya Penyuluhan dan pengendalian	2.kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali

No	Sasaran SKPD	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
	polusi dan pencemaran dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 2 kali pada tahun 2015					
50	Meningkatnya Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 2 dokumen pada tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	2 dok	2 dok
51	Meningkatnya Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 5 kali pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
52	Meningkatnya Penyusunan kebijakan, norma, standard prosedur dan manual pengelolaan RTH dari 0 dokumen pada tahun 2011 menjadi 2 dokumen pada tahun 2015	0 dok	1 dok	0 dok	0 dok	1 dok
53	Meningkatnya Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH dari 0 kali pada tahun 2011 menjadi 2 kali pada tahun 2015	0 kali	0 kali	1 kali	1 kali	2.kali
54	Meningkatnya Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 5 dokumen pada tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
55	Meningkatnya Penyusunan program pengembahan RTH dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 5 dokumen pada tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
56	Meningkatnya Penataan RTH dari 1 dokumen pada tahun 2011 menjadi 5 dokumen pada tahun 2015	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
57	Meningkatnya Pemeliharaan RTH dari 50.000 m ² pada tahun 2011 menjadi 130.000 m ² pada tahun 2015	50.000 m ²	20.000 m ²	20.000 m ²	20.000 m ²	20.000 m ²
58	Meningkatnya Pengembangan taman rekreasi dari 1 unit pada tahun 2011 menjadi 5 unit pada tahun 2015	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
59	Meningkatnya Pengawasan dan pengendalian RTH dari 2 kali pada tahun 2011 menjadi 2 kali pada tahun 2015	2.kali	2.kali	2 kali	2 kali	2 .kali
60	Meningkatnya Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH Dari 1 kali pada tahun 2011 menjadi 1 kali pada tahun 2015	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali

C. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas, arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi:

Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk: (1) mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan; (2) meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup dimulai dari tingkat desa sampai kabupaten; (3) meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum dan aturan lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan; (4) meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan; (5) meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana; (6) membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam

memantau kualitas lingkungan hidup; dan (7) meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan.

D. Program

Untuk mencapai sasaran ditetapkan disusun prioritas program dan pagu pendanaan sebagai berikut :

Tabel 8.16
Indikasi Program / Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
01	Program Pengembangan pengelolaan perampahan	965	1037	1060	1087	1118
02	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2840	2935	3099	3265	3436
03	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	885	942	1006	1077	1158
04	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	525	577	634	698	769
05	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1075	896	920	950	980
06	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	50	410	415	421	828
07	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	150	155	160	166	173
08	Program Pengendalian kebakaran hutan	75	85	95	106	118
09	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	0	0	0	0	0
10	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	807	988	1061	1172	1402
11	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	500	250	200	50	50

8.2.9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

A. Permasalahan

Pemasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lima tahun ke depan adalah :

1. Belum tertatanya administrasi Kependudukan
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
3. Belum tersedianya Bank data sebagai data basis Kependudukan.

B. Sasaran

Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut, maka disusun sasaran sebagai berikut :

Tabel 8.17
Rencana Target Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2011-2015

No	Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya administrasi kependudukan	Peningkatan kesesuaian administrasi kependudukan	69.48%	77.83 %	86.18 %	94.28 %	95 %
		Prosentase Penduduk yang memiliki KK	25.35%	30.42%	36.51%	43.81%	2.58%
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	69.48%	77.83 %	86.18 %	94.28 %	95 %
2	Meningkatnya Pelayanan bidang Pencatatan Sipil	Prosentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	14.30%	16.66%	18.92%	21.08%	23.15%
		Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	14,26%	20%	25%	30%	35%
		Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Perceraian	0%	0%	0%	0%	0%
		Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian	0,02%	5%	10%	20%	30%
		Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	0%	0%	0%	0%	0%
3	Tersedianya Data Statistik Kependudukan	Jumlah Penduduk menurut Struktur umur, jenis kelamin.	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Penduduk menurut Pendidikan akhir	50 %	60%	70%	80%	90%
		Jumlah Penduduk menurut jenis pekerjaan	75%	80%	85%	90%	95%
		Jumlah Penduduk menurut Golongan darah	50%	55%	60%	65%	70%
		Jumlah Penduduk menurut Agama	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya Aparatur Pelayanan yang handal dan profesional	Jumlah Peserta Bintek Verifikasi/validasi Biodata Tingkat Kecamatan dan Desa	42 orang	277 orang	277 orang	277 orang	277 orang
		Jumlah Peserta Operator SIAK tingkat Kecamatan	44 orang	44 orang	44 orang	44 orang	44 orang
		Jumlah Peserta Pelatihan Administrator Database Kependudukan tingkat Kabupaten	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang
		Orientasi Peningkatan kapasitas aparatur bidang kependudukan dan Catatan Sipil	30 orang	50 orang	70 orang	90 orang	90 orang

C. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti tertib administrasi kependudukan.

D. Program

Untuk mencapai sasaran, ditetapkan prioritas program sebagai berikut :

Tabel 8.18
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
01	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5925	6450	6225	5700	5000

8.2.10 Kantor Pemberdayaan Perempuan

A. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi lima tahun ke depan adalah :

1. Peran Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan khususnya berkaitan dengan kebijakan Politik dan Kegiatan Usaha masih tertinggal dari kaum laki-laki.
2. Partisipasi Perempuan disektor Ekonomi Perempuan mengerjakan pekerjaan yang sama seperti dilakukan laki-laki, namun ia mendapatkan upah yang rendah.
3. Di pemerintahan masih banyak laki-laki yang menduduki jabatan strategis karena perempuan masih dinomorduakan dalam mengambil keputusan.
4. Adanya kekerasan rumah tangga. Permasalahan yang dihadapi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan, hal ini masih bersifat kekeluargaan / dapat diselesaikan secara damai, sehingga tidak termonitor. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini berkaitan dengan sifat malu, takut dan harga diri bagi korbannya.

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka disusun sasaran dan rencana target sebagai berikut :

Tabel 8.19
Rencana Target Capaian Kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan Tahun 2011-2015

No	Sasaran SKPD	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	2.	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya jumlah regulasi kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak	16 buah	16 buah	15 buah	14 buah	14 buah
2	Meningkatnya Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan dari 20 kelompok pada tahun 2011 menjadi 112 kelompok pada tahun 2015	20 kelompok	20 kelompok	22 kelompok	24 kelompok	26 kelompok
3	.Meningkatnya Fasilitas	-	1 kali	-	-	-

No	Sasaran SKPD	Rencana Target Capaian Kinerja				
	pengembangan pusat terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dari 1 (satu) pada tahun 2011 menjadi 1 (satu) pada tahun 2015.					
4	.fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	4 Kec	4 Kec	4 Kec	4 Kec	5 Kec

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan perempuan dan perlindungan anak adalah: Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan pemahaman konsep gender dan perlindungan perempuan dan anak dari KDRT

D. Program

Untuk mendukung penacapaian sasaran dirumuskan program sebagai berikut:

Tabel 8.20
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
01	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	350	350	350	350	350
02	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	775	800	825	700	725
03	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	575	575	425	475	475
04	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	575	575	425	475	475
05	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1825	1825	1825	1825	1825
06	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	0	0	450	0	0

8.2.11 Badan Keluarga Berencana

A. Permasalahan

Permasalahan Kependudukan dan Keluarga Kecil meliputi :

1. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk.
2. Masih tingginya tingkat kelahiran penduduk.
3. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak - hak reproduksi dan kesehatan reproduksi.
4. Masih rendahnya usia kawin pertama penduduk.
5. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB.
6. Masih kurang maksimalnya akses dan kualitas pelayanan KB.
7. Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga.
8. Masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan KB.

9. Belum serasinya kebijakan kependudukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
10. Belum tertatanya administrasi kependudukan.
11. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasi.
12. Belum tersedianya bank data sebagai data basis kependudukan.

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas disusun sasaran:

Tabel 8.21
Rencana Target Capaian Kinerja Badan Keluarga Berencana Tahun 2011-2015

No	Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk musu rawas menjadi 1,5 % pada tahun 2015	Munurut laju perumbuhan penduduk menjadi 1,5% pada tahun 2015 jumlah penduduk = 734.317 jiwa jumlah anak dalam keluarga = 325.991 jiwa	2.3%	2,2%	2,1%	2,0%	1,5%
2	Menurunya disparitas angka kelahiran total (tfr) menjadi 2,1 % pada tahun 2015	Menurunkan disparitas TFR (Tingkat Kelahiran Total) menjadi 2,1% pada tahun 2015 jumlah PUS = 114.183 jumlah PUS ASFR = 7.327 (ASFR = umur khusus 15-19 thn)	5,7 %	4,6 %	3,4 %	2,9 %	2,4 %
3	Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi bagi PUS menjadi 90% pada tahun 2015	Meningkatkan pemakaian alat kontrasepsi bagi PUS menjadi 90% pada tahun 2015 Jumlah = 114.183 Jumlah peserta KB aktif/PA =89.393	78%	80%	83%	86%	90%
4	Meningkatnya jumlah Kelompok BKB menjadi 106,775 kelompok pada tahun 2015	Meningkatnya jumlah kelompok BKB (Bina Keluarga Berencana) menjadi 106.775 kelompok pada tahun 2015	89.302 klpk	98.201 klpk	100.67 0 klpk	100.77 0 klpk	106.77 5 klpk
5	Meningkatnya jumlah keluarga balita bergabung dalam kelompok BKB menjadi 90% pada tahun 2015	Meningkatnya jumlah keluarga balita bergabung dalm kelompok BKB (%) Jumlah keluarga menjadi anggota kelompok BKB = 36.525 Jumlah keluarga menjadi anggota kelompok keluarga yang aktif/hadir dalam pertemuan/penyuluhan = 9.737	18.263% 50%	21.915 % 60%	25.568 % 70%	29.220 % 80%	32
6	Meningkatnya pengetahuan sikap 'dan perilaku (PSP) masyarakat khususnya PUS, Remaja dan anggota keluarga lainnya tentang pengendalian penduduk dan KB melalui media elektronik, cetak dan media luar ruang serta 'melalui MUPEN (Mobil	'Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku 'masyarakat (PUS, Remaja dan anggota keluarga lainnya) tentang pengendalian penduduk dan KB melalui media elektronik, cetak dan media luar ruang serta MUPEN menjadi 90% pada tahun 2015	50%	60%	70%	80%	90%

No	Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Unit Penerangan menjadi 90% pada tahun 2015						
7	Penguatan sumber daya penyelenggara program KB melalui pemberdayaan PLKB dan Sub PPKBD di lapangan dalam penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB berbasis Tehnologi Informasi (TI) menjadi 95% pada tahun 2015	Menguatkan sumber daya penyelenggara program KB melalui pemberdayaan PLKB dan Kader dilapangan dalam penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB berbasis Tehnologi Informasi (TI) menjadi 95% pada tahun 2015	65%	70%	75%	80%	95%
8	Menurunnya kebutuhan ber KB tidak terlayani (Unmet Need dari PUS menjadi 5% pada tahun 2015	Menurunkan kebutuhan ber KB tidak terlayani / unmet need dari PUS menjadi 5% pada tahun 2015 Jml PUS = 114.183 Jml Unmet Need = 15.849 (Unmet Need = PUS bkn pst KB tp IAT, TIA, IAS)	15.849 13,88%	10.276 9%	7.993 7%	6.851 6%	5.709 5%
9	Meningkatnya kesertaan ber KB PUS Keluarga Pra S dan KSI menjadi 70% pada tahun 2015	Meningkatkan kesertaan ber KB Keluarga Pra S dan KS I menjadi 70% pada tahun 2015 Jml PUS = 114.183 Jml Pst KB Pra S = 15.799 Jml Pst KB KS I = 20.138 Total Jml Pst KB Pra S+KS I = 35.937	35.397 31%	39.964 35%	68.510 60%	74.219 65%	79.928 70%
10	Meningkatnya Kelompok UPPKS aktif yang berusaha menjadi 65% pada tahun 2015	Meningkatkan Kelompok UPPKS Aktif yg berusaha menjadi 65% pada tahun 2015 Jml Klrg yg mnjdi anggt klp UPPKS = 20.615 Jml Keluarga mnjdi anggota kelompok kegiatan UPPKS berusaha = 9.726	9.277 45%	10.307	11.338	12.369	13.399
11	Meningkatnya Jumlah keluarga Remaja bergabung dalam kelompok BKR menjadi 100% pada tahun 201	Meningkatkan Jumlah keluarga Remaja bergabung dalam kelompok BKR menjadi 100% pada tahun 2015 Jml Klrg yg mnjdi anggt klp BKR = 3.737 Jml Klrg mnjdi anggt klp keg yg aktif/hadir dalam pertemuan/penyuluhan = 3.541	3.550 95%	3.588 96%	3.625 97%	3.662 98%	3.737 100%
12	Meningkatnya Jumlah keluarga Lansia bergabung dalam kelompok BKL menjadi 95% pada tahun 2015	Meningkatnya Jumlah keluarga lansia bergabung dalam kelompok BKL menjadi 95% pada tahun 2015 Jml Klrg yg mnjdi anggt klp BKL = 3.451 Jml Klrg mnjdi anggt klp keg yg aktif/hadir dalam pertemuan/penyuluhan = 3.014	3.002 87%	3.071 89%	3.106 90%	3.175 92%	3.278 95%
13	Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera dan KS I menjadi 10% pada tahun 2015	Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera & KS I menjadi 10% pada tahun 2015 Jml Keluarga keseluruhan = 134 Jml Keluarga Pra S = 25.843 dan KS I = 32.941 Jml Total PraS + KSI = 58.784	32.351 24%	26.959 20%	21.568 16%	18.872 14%	13.480 10%

C. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan keluarga berencana diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas dengan:

1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk
2. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi; melindungi peserta KB dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi; peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian kontrasepsi yang efektif dan efisien untuk jangka panjang
3. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja
4. Penguatan institusi masyarakat dan pemerintah daerah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi; serta pemberian konseling tentang permasalahan remaja
5. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak
6. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB

D. Program

Untuk mendukung pencapaian sasaran dirumuskan program sebagai berikut:

Tabel 8.22
Indikasi Program / Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
01	Program Keluarga Berencana	390	391	392	393	394
02	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	89,5	93,5	97,5	101,5	105,5
03	Program pelayanan kontrasepsi	2124,	2139	2173	2187	2220
04	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	2113	2123	2126,	2187	2223
05	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	21	23	25	27	29
06	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	125	125	125	125	125
07	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	28	29	30	31	32
08	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	90	80	80	80	80
09	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	91	89	89	89	89
10	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	29	28	28	28	28

8.2.12 Dinas Sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada

melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil dan perdesaan.

A. Permasalahan

Rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ;

1. Penyandang cacat masih menghadapi kendala untuk kemandirian, produktivitas dan hak untuk hidup normal yang meliputi antara lain akses ke pelayanan sosial dasar;
2. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan, dan aksesibilitas terhadap pelayanan umum;
3. Rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial;
4. Masih lemahnya penanganan korban bencana alam dan sosial;
5. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya bencana alam;
6. Belum ada data base yang akurat mengenai PMKS.

B. Sasaran

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, disusun rencana target sebagai berikut

Tabel 8.23
Rencana Target Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2011-2015

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1. Meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang memiliki rumah layak uni 2591 unit pada tahun 2015	Jumlah pemukiman yang layak huni sejumlah 416 rumah	83 Rumah	83 Rumah	83 Rumah	83 Rumah	84 Rumah
2. Meningkatnya jumlah kecamatan yang siap siaga dalam penanganan bencana menjadi 10 kecamatan	-Jumlah kecamatan yang siap siaga dalam penanganan bencana sejumlah 10 kecamatan - Meningkatnya profesionalisme TAGANA sejumlah 279 orang	5 Kecamatan 55 Org	5 Kecamatan 56 Org	56 Org	56 Org	56 Org
3. Meningkatnya jumlah KT, PSM, dan orsos yang memenuhi persyaratan	Jumlah KT Potensial : 104 PSM Potensial : 164 Orsos Potensial ; 210	21 KT 33 Org 42 Orsos	21 KT 33 Org 42 Orsos	21 KT 33 Org 42 Orsos	21 KT 33 Org 42 Orsos	20 KT 32 Org 42 Orsos
4. Meningkatnya rasio tugu/monumen perjuangan yang kondisinya baik terhadap total yang ada 100 %	Jumlah Monomen dan tugu pahlawan yang kondisinya baik sejumlah 4 buah (Muara Beliti, Rawas Ulu, Megang Sakti dan Jayaloka)	4 buah (rehab ringan)	4 buah (rehab ringan)	4 buah (rehab ringan)	4 buah (rehab ringan)	4 buah (rehab ringan)
5. Meningkatnya penanganan masalah-masalah sosial mencapai 90% padatahun 2015	Jumlah PMKS yang tertangani sejumlah 9.070 org (anak terlantar 127, anak nakal 173, WRSE 856, Lanjut Usia 1.570, Cacat 1.893, Tuna social	4.227 PMKS {25 anak terlantar. 171 WRSE. 1.570 LU (bantuan	4.198 PMKS {25 anak terlantar. 171 WRSE. 1.570 LU	4.075 PMKS {25 anak terlantar. 171 WRSE. 1.570 LU	4.075 PMKS {25 anak terlantar. 171 WRSE. 1.570 LU	4.047 PMKS {27 anak terlantar. 172

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
	16, eks napi 13, Korban NAPZA 460, Fakir Miskin 2.591 dan KAT 1.388)	permakan) Cacat 80 Tuna social 16. Eks napi 13. Korban NAPZA. 92. Fakir miskin 699, KAT 1.388 }	(bantuan permakan) Cacat 80 . Korban NAPZA. 92. Fakir miskin 699 KAT 1.388 }	(bantuan permakan) Cacat 80 . Korban NAPZA. 92. Fakir miskin 699 KAT 1.388 }	(bantuan permakan) Cacat 80 . Korban NAPZA. 92. Fakir miskin 699 KAT 1.388 }	WRSE. 1.570 LU (bantuan permakan) Cacat 80 . Korban NAPZA. 92. Fakir miskin 670 KAT 1.388 }
6. Tersedianya tenaga kerja bagi PMKS yang memiliki keterampilan menjadi pada tahun 2015	Jumlah PMKS yang memiliki keterampilan berjumlah 4.882	982 org {271 org WRSE 20 org Paca 50 Eks Napi. 699 org Fakir Miskin}	982 org {271 org WRSE 20 org Paca 50 Eks Napi. 699 org Fakir Miskin}	982 org {271 org WRSE 20 org Paca 50 Eks Napi. 699 org Fakir Miskin}	982 org {271 org WRSE 20 org Paca 50 Eks Napi. 699 org Fakir Miskin}	954 org {272 org WRSE 20 org Paca 50 Eks Napi. 670 org Fakir Miskin}
7. Meningkatnya persentase areal pemakaman yang kondisinya baik terhadap areal pemakaman yang ada menjadi 90% pada tahun 2015	Jumlah areal pemakaman bagi KAT berjumlah 6	3 lokasi (Muara Tiku, Semangus lama, Semangus Baru)	3 lokasi (Tebing Tinggi, Sukaraya dan Sungai Jernih)	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang memperhatikan keserasian kebijakan daerah serta kesetaraan gender, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. Memberikan peluang kepada PMKS untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya;
4. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial;
5. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial;
6. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya;
7. Mengembangkan sistem perlindungan sosial daerah;
8. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;

9. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial;
10. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

D. Program

Untuk mendukung penacapaian sasaran dirumuskan program sebagai berikut:

Tabel 8.24
Pagu Indikatif Dinas Sosial Tahun 2011 – 2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
01	Program Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya.	.2.000.-	6.949	6.730	6.630	6.580
02	Program Pelayanan dan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1250.-	2.250	3.250	2.250	2.250
03	Program Pembinaan Anak Terlantar	1.000.-	1.750	1.250	750	250
04	Program Pemberdayaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	1.000.-	1.689	1.689	1.689	1.788
05	Program Pembinaan Panti Asuhan / Jompo	11.032.	2.115	1.808	2.049	2.410
06	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit social (Eks Narapidana, PSKS, Narkotika dan Penyakit sosial lainnya).	450.-	460	460	460	460
07	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.500.	2.046	1.466	1.396	1.396
08	Program pembangunan Taman Makm Pahlawan, monomen perjuangan dan tugu pahlawan	470	350	30	30	30

8.2.13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

A. Permasalahan

Pemasalahan yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi lia tahun mendatang meliputi :

1. Masih tingginya angka pengangguran.
2. Kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas
3. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
4. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja
5. Semakin kritisnya masyarakat dan tingginya tuntutan terhadap pelayanan
6. Masih kurangnya kesadaran Pengguna Tenaga Kereja untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
7. Rendahnya kualitas pencari kerja
8. Terbatasnya jumlah peralatan penunjang dalam pelatihan.

9. Peralatan yang digunakan untuk pelatihan tenaga kerja tidak memenuhi syarat dan sudah ketinggalan teknologi
10. Kurangnya tenaga instruktur pelatihan

B. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan terciptanya lapangan kerja baru serta meningkatnya arus tenaga kerja yang berkualitas.

Tabel 8.25
Rencana Target Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011-2015

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1. Meningkatnya kelancaran pelayanan public dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan pelayanan public	200 Org	200 Org	200 Org	400 Org	400 Org
	Terbangunnya Balai Latihan Kerja	2 Unit	8 Unit	10 Unit		
2. Tercapainya peningkatan perencanaan program, sistem informasi database yang akurat	Tersedianya Buku Sakerda	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku
4. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Jumlah Instruktur dan Tenaga Pelatihan yang dikembangkan	20 Org	20 Org	20 Org	20 Org	20 Org
5. Meningkatnya ketrampilan dan kualitas calon tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi dunia kerja dan kebutuhan pasar kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih	200 Org	200 Org	200 Org	400 Org	400 Org
6. Tercapainya perbaikan kendaraan Dinas operasional untuk MTU	Terselenggaranya mobilitas pelatihan keliling.	3 Unit Mobil Training Unit (MTU)	3 Unit Mobil Training Unit (MTU)	3 Unit Mobil Training Unit (MTU)	3 Unit Mobil Training Unit (MTU)	3 Unit Mobil Training Unit (MTU)
7. Meningkatnya kerjasama pendayagunaan fasilitas latihan dan terserapnya siswa hasil latihan magang ke perusahaan	Terserapnya angka pengangguran terbuka.	1044 Org	1044 Org	1044 Org	1044 Org	1044 Org
8. Meningkatnya penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL	Jumlah AKL yang ditempatkan	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org
9. Meningkatnya penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL	Jumlah AKL yang ditempatkan	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org
10. Meningkatnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja utamanya nakerwan dan pekerja anak	Jumlah Tenaga Kerja Wanita	30 Org	30 Org	30 Org	30 Org	30 Org
11. Penerapan norma K3 di Perusahaan agar	Jumlah Kasus di Perusahaan	16 Kasus	16 Kasus	16 Kasus	16 Kasus	16 Kasus

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
tercapai 12. zero accident (Angka kecelakaan nihil)	Jumlah Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan	40 Org	40 Org	40 Org	40 Org	40 Org
13. Terlaksananya pembinaan tenaga kerja dan LKS Bipartit sehingga tercapai hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha dan pemerintah	Jumlah LKS Bipartit	3 LKS Bipartit	3 LKS Bipartit	3 LKS Bipartit	3 LKS Bipartit	3 LKS Bipartit
	Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	6 PP dan 1 PKB	6 PP dan 1 PKB	6 PP dan 1 PKB	6 PP dan 1 PKB	6 PP dan 1 PKB
	Jumlah Pekerja, Pengusaha yang mengerti Undang-Undang Ketenagakerjaan	40 Org	40 Org	40 Org	40 Org	40 Org
14. Meningkatnya pembinaan dan penempatan daerah transmigran yang berkualitas, serta mengembangkan kerjasama bidang transmigrasi (MOU) dengan pulau Jawa	Jumlah Warga UPT Pauh II	300 KK	300 KK	300 KK	300 KK	
	Jumlah beban sertifikasi kepemilikan Lahan	309 persil	300 persil	600 persil	550 persil	128 persil
	Pembebasan Lahan Pusat Kota Terpadu Mandiri (KTM)	100 Ha	-	-	-	-
	Jumlah Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP)	2 Paket	-	-	-	-
15. Meningkatnya Perencanaan dan Program Pembangunan Ketenagakerjaan dan	Dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
16. Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70.50%	68%	66%	64%	62%
	Terserapnya angka pengangguran terbuka	1044 Org	1044 Org	1044 Org	1044 Org	1044 Org
17. Meningkatnya SDM warga transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi	150 KK	150 KK	100 KK	100 KK	100 KK

C. Arah Kebijakan

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas. Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama kurun waktu 2010 - 2015 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana yang optimal;
2. Peningkatan perencanaan dan system informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
3. Peningkatan SDM melalui diklat teknis dan fungsional;
4. Peningkatan dan pengembangan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
5. Peningkatan dan pendayagunaan fasilitas latihan melalui kerjasama pihak ke III;
6. Peningkatan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta mengeliminir ekkses – ekkses negatif yang timbul akibat kebijakan ini;
7. Pembinaan kewirausahaan dan pengembangan produktivitas serta padat karya produktif;
8. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja di perusahaan;
9. Membangun hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha dan pemerintah;

10. Penyelenggaraan transmigrasi;
11. Pengembangan Kota Terpadu Mandiri.

D. Program

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan,. Disusun program prioritas sebagaimana dalam tabel 8.26.

Tabel 8.26
Indikasi Program / Kegiatan Prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
01	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.750	9.874	4.855	1.550	2.250
02	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	630	725	800	890	1.010
03	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	9.339	2.760	2.745	2.510	1.431

8.2.14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

A. Permasalahan

Pemasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah lima tahun ke depan adalah

1. Rendahnya produktivitas , sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antar pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. (a) rendahnya kualitas sumberdaya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan, teknologi, dan pemasaran; (b) rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.
2. Terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif (permodalan, teknologi, informasi, dan pasar)
3. Produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas.
4. Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi.
5. Kurang Kondusifnya iklim usaha, dicirikan oleh ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan, besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perijinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi, praktik bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat, lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM.

B. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di antaranya sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan tinggi.

2. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal.
3. Bertambahnya unit usaha koperasi.
4. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan tinggi dan laju pertumbuhan nilai tambahnya juga tinggi.
5. Berfungsinya system untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.
7. Meningkatnya permodalan dan volume usaha koperasi dan UKM.

Tabel 8.27
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Meningkatnya pemahaman pelaku UKM tentang peraturan perundang-undangan, perizinan serta ketersediaan sarana prasarana pengembangan produksi	Draft Rancangan Peraturan Daerah	1 draft Rancangan Perda	-	-	-	-
	Jumlah UKM yang ditingkatkan pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan	80 UKM	80 UKM	80 UKM	80 UKM	80 UKM
	Jumlah UKM yang difasilitasi legilitas usahanya	30 UKM	30 UKM	30 UKM	30 UKM	30 UKM
	Jumlah UKM yang di fasilitasi peralatan dengan teknologi tepat guna	4 UKM	4 UKM	4 UKM	4 UKM	4 UKM
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk UKM	Pelaksanaan promosi produk UKM keluar daerah	3 even	3 even	3 even	3 even	3 even
	Jumlah UKM yang di tingkatkan pengetahuan kewirausahaannya	120 UKM	120 UKM	120 UKM	120 UKM	120 UKM
	Jumlah pelaku UKM yang di tingkatkan kemampuan mengelola usahanya	120 UKM	120 UKM	120 UKM	120 UKM	120 UKM
3. Meningkatnya jaringan pemasaran hasil produksi UMKM	Pemantauan optimalisasi pemanfaatan fasilitas pemerintah oleh koperasi/UKM	21 Kec	21 Kec	21 Kec	21 Kec	21 Kec
	Pemantauan dana bergulir pemerintah yang dimanfaatkan oleh UMKM	21 Kec	21 Kec	21 Kec	21 Kec	21 Kec
	Penyelenggaraan Bazar/pameran dalam rangka hari ulang tahun koperasi	2 even	2 even	2 even	2 even	2 even
	Jumlah UKM yang diperkuat permodalannya	300 UKM	300 UKM	300 UKM	300 UKM	300 UKM

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Jumlah pasar tradisional yang dibangun dan dikelola oleh koperasi	2 pasar tradisional	2 pasar tradisional	2 pasar tradisional	1 pasar tradisional	-
4. Meningkatnya jumlah koperasi yang tangguh dan berkualitas	Jumlah koperasi yang ditingkatkan jaringan dan kerjasamanya	45 kop/90 org 3 angk/th	45 kop/90 org 3 angk/th	45 kop/90 org 3 angk/th	45 kop/90 org 3 angk/th	45 kop/90 org 3 angk/th
	Jumlah koperasi yang dinilai klasifikasinya dan penghargaan bagi koperasi berprestasi	744 klasifikasi kop dan 10 penghargaan	744 klasifikasi kop dan 10 penghargaan	844 klasifikasi kop dan 10 penghargaan	844 klasifikasi kop dan 10 penghargaan	944 klasifikasi kop dan 10 penghargaan
	Jumlah koperasi yang ditingkatkan kelembagaan, usaha dan permodalannya	100 kop	100 kop	100 kop	100 kop	100 kop
	Jumlah juru buku koperasi yang mengikuti pelatihan Akutansi/manajemen koperasi	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang
	Jumlah pengurus koperasi pola syariah yang ditingkatkan pengetahuannya	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang
	Jumlah KSP/USP yang menerima penguatan permodalan	10 kop	10 kop	10 kop	10 kop	10 kop
	Jumlah koperasi penyalur sembako di distrik Agropolitan	2 kop	1 kop	1 kop	1 kop	1 kop
	5. Meningkatnya jumlah koperasi	Jumlah koperasi baru yang dibentuk	100 kop	100 kop	36 kop	20 kop

C. Arah Kebijakan

Dalam meningkatkan capaian kinerja sasarantersebut di atas, ditetapkan arah kebijakan:

1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah.
2. Memperkuat kelembagaan dengan jalan : memeluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan; memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan; meningkatkan kualitas institusi pendukung, intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan cara :
 - a. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan penerapan teknologi;

- b. Pengembangan UMKM melalui pendekatan klaster agrobisnis dan agroindustri
 - c. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM;
 - d. Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan daerah, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di daerah.
4. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar lokal.
 5. Membangun koperasi yang di arahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk : (i) Peningkatan status badan hukum koperasi, (ii) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindungnya koperasi dan/atau anggotanya dan praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (iii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepada koperasi; (iv) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

D. Program

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana berikut pada tabel 8.28

Tabel 8.28
Indikasi Program Prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
01	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	820	820	820	820	820
02	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1150	1150	1150	1150	1150
03	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro	4020	4020	3020	2020	4020
04	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	4050	4030	4050	4050	4050
05	Program menuju 1000 koperasi	400	400	175	175	175

8.2.15 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan

A. Permasalahan

Pemasalahan yang dihadapi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perijinan lima tahun ke depan adalah

1. Belum optimalnya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Iklim investasi Kurang Kondusif.
3. Kurang Tergali dan Terpublikasi Potensi dan Peluang Investasi.
4. Kurang Koordinasi

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan sasaran sebagai berikut:

Tabel 8.29
Rencana Capaian Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 – 2015

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Tersedianya sumberdaya aparatur yang handal dibidang pelayanan perizinan dan investasi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	20%	30%	40%	50%	60%
2. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan investasi	Jumlah sarana dan prasarana	35%	40%	45%	50%	55%
3. Tersedianya Regulasi Perizinan dan Investasi	Tersedianya jumlah perda perizinan	12	14	16	18	20
4. Peningkatan waktu penyelesaian	Kesesuaian dengan SOP	50%	60%	70%	80%	90%
5. Transparansi	Pemahaman terhadap perizinan	50%	60%	70%	80%	90%
6. Kepuasan pelayanan	Jumlah pengaduan/complain	80%	85%	87%	90%	95%
7. Berkurangnya permasalahan perusahaan dengan masyarakat	Jumlah permasalahan	7%	6%	5%	4%	3%
8. Ketaatan perusahaan terhadap kewajiban	Penyampaian LKPM dan pengurusan perizinan	16%	30%	50%	70%	90%
9. Kepastian dalam berinvestasi	Kegagalan investasi	0%	0%	0%	0%	0%
10. Peningkatan realisasi perizinan	Status perizinan	70%	75%	80%	82%	85%
11. Peningkatan realisasi produksi	Kapasitas produksi	60%	70%	80%	90%	95%

C. Arah Kebijakan

Dalam meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut di atas, ditetapkan arah kebijakan:

1. Memberikan fasilitas dan kemudahan untuk mengembangkan kemampuan bagi aparatur meliputi *managerial skill* dan *tehnical skill*.
2. Memberikan fasilitas kesejahteraan berbasis kinerja.
3. Memfasilitasi pelayanan sarana dan prasarana pelayanan perizinan disesuaikan dengan manajemen standar pelayanan.
4. Memfasilitasi percepatan pembuatan produk hukum regulasi perizinan dan investasi
6. Meningkatkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait, pengusaha dan masyarakat
7. Menciptakan kepastian berinvestasi bagi pengusaha.
8. Meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan investasi sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM).
9. Mengembangkan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal berbasis e-government.
10. Mengembangkan jaringan pasar, pembiayaan dan permodalan.

D. Program

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan disusun program sebagaimana pada tabel 8.30.

Tabel 8.30
Indikasi Program Prioritas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
01	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2800	2395	2565	2585	2780
02	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	2410	1280	1570	1750	2035
03	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	200	200	200	200	200

8.2.16 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

A. Permasalahan

Beberapa permasalahan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1 Permasalahan Pokok dalam Pembangunan dan Pengembangan Kebudayaan
 - a. Belum adanya konsep kebijakan dan strategi pembangunan pengembangan Kebudayaan Nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam memajukan Kebudayaan Daerah.
 - b. Masih lemahnya Pembangunan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah dalam menanggulangi Kebudayaan Asing.
 - c. Belum dimanfaatkannya Media Massa dalam upaya pembentukan watak dan jati diri Bangsa secara maksimal.
 - d. Belum validnya Data Kebudayaan (Kesenian, Arah Nitra dan Kepurbakalaan).
 - e. Belum adanya pedoman perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.
 - f. Kurangnya tenaga profesional pengelola bidang Seni Budaya.
 - g. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah.
 - h. Hasil – hasil penelitian kebudayaan belum dimanfaatkan secara optimal.
 - i. Data dan Informasi Kebudayaan belum dikelola secara profesional.
 - j. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengembangan Seni Budaya.
6. Permasalahan Lainnya dalam Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata
 - a. Belum terdatanya ODTW yang potensial.
 - b. Belum adanya sinkronisasi antara pusat dan daerah serta industri pariwisata untuk menangani kepariwisataan di daerah.
 - c. Belum terolahnya Objek dan kawasan Daerah Wisata yang potensial.
 - d. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Wisata yang masih parsial.
 - e. Belum adanya pengembangan System Informasi Kepariwisata Daerah.

- f. Belum tercapainya keterpaduan berbagai sektor untuk secara bersama mengembangkan kepariwisataan
- g. Belum tersosialisasinya Visi dan Misi pengembangan Pariwisata ke berbagai sektor, instansi dan lembaga terkait.

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 8.31
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 -2015

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Meningkatnya jumlah regulasi yang berkaitan dengan pariwisata yang diterbitkan dalam setahun	3 SK Bupati	-	2	-	1	-
	3 Peraturan Bupati	-	1	1	1	-
	3 Peraturan Daerah	1	-	-	1	-
2. Meningkatnya jumlah moment kepariwisataan yang berkembang	Diterbitkannya 25 moment pariwisata	5	5	5	5	5
3. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana ODTW yang memenuhi persyaratan	Tersedianya jumlah sarana dan prasarana di ODTW di dua (dua) lokasi	2	-	-	-	-
4. Meningkatnya jumlah hunian hotel yang memenuhi perizinan	Terbangunnya sebuah hotel di kawasan agropolitan center	-	-	-	1	-
5. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana untuk pengembangan Seni Budaya Daerah	Terbangunnya sebuah Gedung Kesenian	-	-	1	-	-
	Tersedianya perlengkapan Sound system yang memadai	-	-	-	1	-
6. Meningkatnya jumlah kelompok / Sanggar Seni yang aktif	Aktifnya 54 sanggar Seni di 21 Kecamatan	10	10	11	11	12
7. Meningkatnya jumlah peserta pagelaran kesenian	Ikut berperannya 54 Sanggar Kesenian dalam Pargelaran Budaya	10	10	11	11	12
8. Terbitnya Seniman / Dalam mengembangkan Seni Budaya Daerah	Terbinanya 150 Seniman	30	30	30	30	30
9. Meningkatnya jumlah seniman dan budayawan yang mendapat penghargaan seni	Diberikannya Penghargaan 15 Seniman/ti yang andil besar dalam Pembinaan Seni Budaya	3	3	3	3	3
10. Meningkatnya jumlah situs purbakala yang dilestarikan	Lestarnya 4 situs purbakala	1	1	1	1	-
11. Meningkatnya jumlah	Terlaksananya Ekavasi	1	1	-	-	-

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
warisan budaya dunia yang dilestarikan	Situs di Batu Sembilan					
12. Meningkatnya Jumlah warisan sejarah yang dilestarikan	Dilestarikannya 10 warisan peninggalan sejarah	2	2	2	2	2
13. Meningkat jumlah warisan hasil karya sastra yang dilestarikan	Dilestarikan 15 cerita rakyat Kab. Musi Rawas	3	3	3	3	3

C. Arah Kebijakan

Dalam meningkatkan capaian kinerja sasarantersebut di atas, ditetapkan arah kebijakan:

1. Arah Kebijakan Bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut :
 - a. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai Budaya dalam rangka Melestarikan menggali dan mengembangkan Nilai-nilai Budaya yang kondusif dan serasi.
 - b. Mengembangkan kelembagaan berkreasi dalam berkesenian dengan tetap mengacu pada etika, moral, dan Agama serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap Karya cipta.
 - c. Memfasilitasi penggalian, pembinaan, pelestarian dan pengembangan Seni Budaya Lokal melalui penyediaan sarana dan prasarana.
 - d. Membentuk dan mengaktifkan Kelembagaan pengembangan Budaya Lokal.
 - e. Melaksanakan Explorasi Budaya dan Ekavasi Kepurbakalaan serta perkembangan Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional.
2. Arah Kebijakan Bidang Kepariwisata adalah sebagai berikut :
 - a. Pengembangan dan penataan Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW).
 - b. Menggali Obyek dan Daya Tarik Kepariwisata.
 - c. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung Kepariwisata.
 - d. Meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja dan sumber pendapatan daerah.

D. Program

Untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, disusun program sebagai berikut :

Tabel 8.32
Indikasi Program Prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
	2	3	4	5	6	7
01	Program Pengembangan Nilai Budaya	295	980	340	1085	295
02	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	375	480	585	675	625
03	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1820	1440	2215	1550	2460
04	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	0	200	0	475	275

05	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1650	1850	1970	1930	2170
----	-------------------------------------------	------	------	------	------	------

8.2.17 Dinas Pemuda dan Olahraga

A. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda dan olahraga dalam lima tahun ke depan adalah:

1. Era globalisasi tanpa batas cukup menyulitkan pembinaan kepemudaan dan olahraga
2. Terbatasnya dana pengembangan olahraga
3. Kesadaran masyarakat untuk membantu kegiatan kepemudaan sangat terbatas.
4. Adanya dekadesi moral

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan sasaran sebagai berikut:

C. Arah Kebijakan

Tabel 8.33
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 – 2015

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Meningkatnya Pendataan potensi kepemudaan	Banyaknya dokumen hasil Pendataan potensi kepemudaan dalam setahun	1	1	1	1	1
2. Meningkatnya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	Frekuensi Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda dalam setahun	1	1	1	1	1
3. Meningkatnya Mengembangkan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH	Banyaknya dokumen hasil Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH dalam setahun	1	1	1	1	1
4. Meningkatnya Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Banyaknya dokumen hasil Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan dalam setahun	1	1	1	1	1
5. Meningkatnya Pembinaan Organisasi kepemudaan	Frekuensi Pembinaan Organisasi kepemudaan dalam setahun	1	1	1	1	1
6. Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Frekuensi Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan dalam setahun	1	1	1	1	1
7. Meningkatnya Penyuluhan	Frekuensi Penyuluhan	1	1	1	1	1

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
pengecehan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	pengecehan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda dalam setahun					
8. Meningkatnya Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Frekuensi Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda dalam setahun	1	1	1	1	1
9. Meningkatnya Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Frekuensi Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan dalam setahun	1	1	1	1	1
10. Meningkatnya Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Frekuensi Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dalam setahun	1	1	1	1	1
11. Meningkatnya Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Frekuensi Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda dalam setahun	1	1	1	1	1
12. Meningkatnya Pendataan potensi kepemudaan	Banyaknya dokumen hasil Pendataan potensi kepemudaan dalam setahun	1	1	1	1	1
13. Meningkatnya Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH	Banyaknya dokumen hasil Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH dalam setahun	1	1	1	1	1
14. Meningkatnya Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Banyaknya dokumen hasil Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan dalam setahun	1	1	1	1	1
15. Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Bagi Pemuda	Frekwensi Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Bagi Pemuda dalam setahun	1	1	1	1	1
16. Meningkatnya Pembinaan dan Pelatihan Pemuda Dalam Peningkatan Produktifitas Pertanian	Frekwensi Pembinaan dan Pelatihan Pemuda Dalam Peningkatan Produktifitas Pertanian dalam setahun	1	1	1	1	1
17. Meningkatnya Pembinaan Pemuda dibidang Pelestarian Lingkungan	Frekwensi Pembinaan Pemuda dibidang Pelestarian Lingkungan dalam setahun	1	1	1	1	1
18. Meningkatnya Pembinaan dan Pelatihan Pemuda dibidang Kesehatan Masyarakat	Frekwensi Pembinaan dan Pelatihan Pemuda dibidang Kesehatan Masyarakat dalam setahun	1	1	1	1	1
19. Meningkatnya Pembinaan dan Pelatihan Pemuda Dalam Pengembangan Produktifitas Peternakan/Perikanan	Frekwensi Pembinaan dan Pelatihan Pemuda Dalam Pengembangan Produktifitas Peternakan/Perikanan dalam setahun	1	1	1	1	1
20. Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Kegiatan	Frekwensi Pembinaan Dan Pengembangan Kegiatan	1	1	1	1	1

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
Kepramukaan	Kepramukaan dalam setahun					
21. Meningkatnya Penyelenggaraan Jambore Daerah Pramuka Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Musi Rawas	Frekwensi Penyelenggaraan Jambore Daerah Pramuka Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Musi Rawas dalam setahun	-	-	1	-	-
22. Meningkatnya Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga (BIMTEK)	Frekwensi Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga (BIMTEK) dalam setahun	1	1	1	1	1
23. Meningkatnya Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah	Frekwensi Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah dalam setahun	1	1	1	1	1
24. Meningkatnya Pembibitan dan Pembinaan Olahraga wan Berbakat	Frekwensi Pembibitan dan Pembinaan Olahraga wan Berbakat dalam setahun	1	1	1	1	1
25. Meningkatnya Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Frekwensi Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah dalam setahun	1	1	1	1	1
26. Meningkatnya Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Frekwensi Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dalam setahun	52	52	52	52	52
27. Meningkatnya Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Frekwensi Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dalam setahun	8	9	10	11	12
28. Meningkatnya Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Frekwensi Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat dalam setahun	3	4	5	6	7
29. Meningkatnya Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	Frekwensi Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi dalam setahun	5	7	7	8	7
30. Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga	Frekwensi Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga dalam setahun	4	5	6	7	8
31. Meningkatnya Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga	Frekwensi Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga setahun	1	1	1	1	1
32. Pembangunan Sport Center	Terlaksananya Pembangunan Sport Center (Unit)	1	1	1	2	1
33. Pembangunan Sasana Olahraga Tinju	Terlaksananya Pembangunan Sasana Olahraga Tinju (unit)	1	-	-	-	-

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
34. Pembangunan Lapangan Olahraga Bola Volly	Terlaksananya Pembangunan Lapangan Olahraga Bola Volly (unit)	1	1	1	1	1
35. Pembangunan Lapangan Olahraga Badminton	Terlaksananya Pembangunan Lapangan Olahraga Badminton (unit)	1	1	1	1	1
36. Pembangunan Lapangan Olahraga Basket	Terlaksananya Pembangunan Lapangan Olahraga Basket (unit)	1	1	1	1	1
37. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Olahraga (GOR)	1	1	1	1	1
	Terlaksananya Pemeliharaan Lapangan Bola Silampari	1	1	1	1	1

C. Arah Kebijakan

Pembangunan kepemudaan diarahkan untuk membretuk pemuda mandiri, kreatif dan semangat kebangsaan yang tinggi. Pembangunan olahraga diarahkan untuk olahraga prestasi dan pemasyarakatan olahraga sebagai salah satu alternatif hidup sehat.

D. Program

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan disusun program sebagai berikut :

Tabel 8.34
Indikasi Program / Kinerja Prioritas Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
01	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	600	204	225	248	275
02	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1680	1800	1933	2048	2178
03	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	780	859	1696	1040	1141
04	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	150	165	180	198	220
05	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	325	390	445	520	585
06	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	6921	8169	13067,4	10518,74	12074,2
07	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	75517,7	12783,13	11755,7	14499,05	10682,95

8.2.18 Badan Kesbangpol dan Linmas

A. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pembinaan terhadap Orsospol, LSM, dan OKP guna terwujudnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Belum mantapnya kesiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana alam.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.
4. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dalam moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku demokrasi.
5. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak social politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6. Belum optimal jumlah Linmas yang ada.
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang ketertiban umum.
8. Belum berperannya dan optimalnya Badan Narkotika Kabupaten Musi Rawas dalam hal pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN).

B. Sasaran

Untuk memecahkan permasalahan tersebut di atas, maka disusun sasaran beserta rencana capaian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 8.35
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Tersedianya tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di desa/kel	Jumlah tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di desa/kel	298 orang	-	-	298 orang	-
2. Terbangunnya pos jaga/roda di desa/kel	Jumlah bangunan pos jaga/roda di desa/kel	1 pos jaga	1 pos jaga	1 pos jaga	1 pos jaga	1 pos jaga
3. Terlaksananya Pelatihan dan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di desa/kel	Jumlah yang dilatih menjadi tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di desa/kel	298 orang	298 orang	298 orang	298 orang	298 orang
4. Terlaksananya pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat di desa/kel, Kec	Jumlah monitoring kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat di desa/kel, Kec	50 kl	50 kl	50 kl	50 kl	50 kl
5. Terbentuknya Tim Pengendalian keamanan lingkungan di desa/kel	Jumlah rapat pengendalian keamanan lingkungan di desa/kel	12 kl rapat	12 kl rapat	12 kl rapat	12 kl rapat	12 kl rapat

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
6. Terlaksananya Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) di desa/kel	Jumlah rapat Forum Kewasdaan Dini Masyarakat (FKDM) di desa/kel	12 kl rapat	12 kl rapat	12 kl rapat	12 kl rapat	12 kl rapat
7. Terpenuhi pakaian linmas di desa/kel	Jumlah pakaian linmas di desa/kel	1187 orang	1187 orang	1187 orang	1187 orang	1185 orang
8. Terlaksananya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (KOMINDA) di masyarakat	Jumlah rapat dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (KOMINDA) di masyarakat	12 kl rapat	12 kl rapat	12 kl rapat	12 kl rapat	12 kl rapat
9. Meningkatnya kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di desa/kel	Jumlah aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di desa/kel	298 orang	298 orang	298 orang	298 orang	298 orang
10. Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama di kecamatan	Jumlah tokoh masyarakat yang dibina dalam melaksanakan kerukunan dan kehidupan beragama di kecamatan	84 orang	84 orang	84 orang	84 orang	84 orang
11. Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat	Jumlah masyarakat yang dilibatkan dalam forum pembauran kebangsaan	52 orang	52 orang	52 orang	52 orang	52 orang
12. Meningkatnya kesadaran masyarakat akar nilai-nilai luhur budaya bangsa dikalangan pelajar	Jumlah pelajar yang mengikuti sosialisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa	40 siswa	40 siswa	40 siswa	40 siswa	40 siswa
13. Terpantaunya orang asing di desa/kel/kec	Jumlah monitoring terhadap orang asing	10 kl	10 kl	10 kl	10 kl	10 kl
14. Terfasilitasinya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tingkat desa/kel, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten	Jumlah rapat Forum pembauran kebangsaan (FPK) tingkat desa/kel, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten	12 kl rapat	12 kl rapat	12 kl rapat	12 kl rapat	12 kl rapat
15. Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, konsepsi nasional dan kepemimpinan bagi kades/lurah	Jumlah kepala desa/lurah yang mengikuti pemantapan nilai-nilai kebangsaan, konsepsi nasional dan kepemimpinan	55 orang	55 orang	55 orang	56 orang	56 orang
16. Terfasilitasinya pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan kawasan kebangsaan	Jumlah rapat forum kerukunan umat beragama dalam upaya peningkatan kawasan kebangsaan	12 kl rapat	12 kl rapat	12 kl rapat	12 kl rapat	12 kl rapat
17. Terlaksananya seminar, talk, show, diskusi peningkatan kawasan kebangsaan	Jumlah seminar, talk, show, diskusi peningkatan kawasan kebangsaan	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl
18. Terlaksananya pentas seni dan budaya, festival, lomba, cipta dalam upaya	Jumlah pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan kawasan	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl	1 kl

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
peningkatan kawasan kebangsaan	kebangsaan					
19. Terlaksananya pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah kesatuan keamanan lingkungan masyarakat yang dibina	1187 orang	1187 orang	1187 orang	1187 orang	1185 orang
20. Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba dikalangan masyarakat	Jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	42 orang	42 orang	42 orang	42 orang	42 orang
21. Terlaksananya penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi di kalangan masyarakat	Jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	42 orang	42 orang	42 orang	42 orang	42 orang
22. Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu dikalangan masyarakat	Jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu	42 orang	42 orang	42 orang	42 orang	42 orang
23. Terlaksananya penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme dikalangan masyarakat	Jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme	42 orang	42 orang	42 orang	42 orang	42 orang
24. Terlaksananya penyuluhan pencegahan praktek perjudian di kalangan masyarakat	Jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti penyuluhan pencegahan praktek perjudian	42 orang	42 orang	42 orang	42 orang	42 orang
25. Terlaksananya penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur di kalangan masyarakat	Jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur	42 orang	42 orang	42 orang	42 orang	42 orang
26. Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah Ormas, LSM, tokoh masyarakat yang mengikuti penyuluhan	50 orang	50 orang	75 orang	90 orang	100 orang
27. Terlaksananya monitoring pelaksanaan pemilu dan pilkada	Jumlah monitoring pelaksanaan pemilu dan pilkada	-	-	50 kl	100 kl	50 kl
28. Terlaksananya sosialisai paket undang-undang bidang politik	Jumlah partai politik yang mengikuti sosialisasi paket undang-undang bidang politik	20 parpol	20 parpol	20 parpol	20 parpol	20 parpol
29. Terlaksananya pokja verifikasi bantuan dana partai politik	Jumlah verifikasi terhadap partai politik	8 kl verifikasi	8 kl verifikasi	8 kl verifikasi	8 kl verifikasi	8 kl verifikasi
30. Terfasilitasinya penyelesaian perselisihan partai politik	jumlah rapat untuk menyelesaikan perselisihan partai politik	6 kl rapat	6 kl rapat	6 kl rapat	6 kl rapat	6 kl rapat
31. Terlaksananya sosialisasi pemilu dan pilkada	Jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti sosialisasi pemilu dan pilkada	-	-	42 orang	42 orang	42 orang

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
32. Terlaksananya koordinasi Forum–forum diskusi politik	Jumlah rapat koordinasi forum-forum diskusi politik	10 kl rapat	10 kl rapat	10 kl rapat	10 kl rapat	10 kl rapat
33. Terlaksananya penyusunan data base partai politik	Jumlah partai politik yang disusun data basenya	13 parpol	-	-	15 parpol	-
34. Terlaksananya penyusunan data base Ormas/LSM	Jumlah Ormas/LSM yang disusun data basenya	10 Ormas/LSM	-	10 Ormas/LSM	-	10 Ormas/LSM
35. Telaksananya Koordinasi forum-forum diskusi Ormas/LSM	Jumlah rapat koordinasi forum-forum diskusi Ormas/LSM	10 kl rapat	5 kl rapat	6 kl rapat	5 kl rapat	7 kl rapat
36. Terlaksananya pokja verifikasi pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat pergantian antar waktu yang diverifikasi	5 kl verifikasi	5 kl verifikasi	5 kl verifikasi	5 kl verifikasi	5 kl verifikasi
37. Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah kecamatan yang di pantau dan disebarluaskan informasi potensi bencana alam	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan
38. Terpenuhi tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah tempat sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
39. Terpenuhi sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah perahu karet untuk evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	10 buah	10 buah	10 buah	10 buah	10 buah
40. Terlaksananya penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah pegawai yang mengikuti penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	25 orang	25 orang	-	-	-
41. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran	25 orang	25 orang	25 orang	17 orang	17 orang
42. Terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah tokoh masyarakat yang mengikuti penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang
43. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran (pembelian mobil pemadam kebakaran dan peralatan lainnya)	Jumlah mobil pemadam kebakaran yang akan diadakan	1 unit	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit
44. Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	12 kl pemeliharaan	12 kl pemeliharaan	12 kl pemeliharaan	12 kl pemeliharaan	12 kl pemeliharaan
45. Terlaksananya	Jumlah monitoring	20 kl	20 kl	20 kl	20 kl	20 kl

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
monitoring pencegahan bahaya kebakaran di desa/kel dan kecamatan	pencegahan bahaya kebakaran di desa/kel dan kecamatan					
46. Terlaksananya pembangunan gedung posko unit penanggulangan bencana kebakaran (PBK) di Muara Beliti	Jumlah gedung posko unit penanggulangan bencana kebakaran (PBK) yang dibangun di Muara Beliti	1 gedung	-	-	-	-

C. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas, arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi :

1. Melaksanakan pembinaan pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal
2. Melaksanakan pembinaan ketahanan nasional, Orpadnas dan bela Negara.
3. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar umat beragama, suku dan kelompok masyarakat lainnya.
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap partai politik.
5. Melaksanakan fungsi koordinasi yang harmonis dengan lembaga legislatif.
6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan demokrasi lokal.
7. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap FKUB, FKDM, FPK, KOMIND, LINMAS dll.
8. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap Ormas, LSM, dan Lembaga Nirlaba lainnya.
9. Melaksanakan koordinasi yang optimal dalam penyelenggaraan kamtibmas dan penanggulangan bencana.
10. Melaksanakan pembinaan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memelihara kamtibmas dan penanggulangan bencana.

D. Program

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan disusun program sebagai berikut :

Tabel 8.36
Indikasi Program Prioritas Badan Kesbangpol dan Linmas
Kabupaten Musi Rawas Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
01	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	1887	1905	2095	2359	2460
02	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	500	500	550	550	600
03	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	835	750	780	905	825
04	Program peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	375	375	345	345	325
05	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1200	1200	1200	1200	1200
06	Program Pendidikan Politik Masyarakat	750	615	1190	1405	1245
07	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk	1200	1200	1200	1200	1200

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
	Menjaga Ketertiban dan Keamanan					
08	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam	545	545	545	545	545

8.2.19 Satuan Polisi Pamong Praja

A. Permasalahan

Pemasalahan yang dihadapi Kantor Sat Pol-PP dalam lima tahun ke depan adalah

1. Kurangnya kesadaran masyarakat mentaati ketentuan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang tugas dan fungsinya.
3. Masih belum memadainya jumlah personil termasuk kualitasnya.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu pembinaan

C. Sasaran

Dalam mengatasi permasalahan, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 8.37
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 – 2015

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya	Bertambahnya personil Satpol PP	150 org	-	150 org	-	300 org
	Tegaknya Perda di Kab. Mura	5 kec	5 kec	4 kec.	4 kec.	3 kec.
	Pemb. Pos Jaga	-	2 unit	-	-	-
2. Meningkatnya pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.	Frekwensi penanganan unjuk rasa	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali
	Jumlah / frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun	360 kali	360 kali	360 kali	360 kali	360 kali
3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung personil dalam melaksanakan tugas.	Jumlah sarana dan prasarana pendukung	4 jenis mobil kendaraan R4 Peralatan komunikasi Peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis peralatan dan perlengkapan kantor
4. Meningkatnya sumber daya manusia yang profesional	Jumlah SDM Satpol.PP.yg Profesional	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org

C. Arah Kebijakan

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun arah kebijakan sebagaimana berikut

1. Meningkatkan upaya sosialisasi melalui mass media, penyebaran brosur-brosur, pembuatan spanduk, pembuatan plang himbauan dan penyuluhan-penyuluhan di tempat-tempat umum terkait dengan pemahaman Perda dan Peraturan Bupati lainnya.
2. Meningkatkan SDM anggota Satpol.PP. Kabupaten Musi Rawas.
3. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Peningkatan monitoring, pembinaan serta penertiban terhadap perizinan yang ada di Kabupaten Musi Rawas.
5. Mengusulkan penambahan jumlah personil memperbaiki pola rekrutmen pegawai/Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas.
6. Memberikan kesempatan kepada personil untuk mengikuti diklat maupun bimbingan teknis dan sosialisasi-sosialisasi.
7. Peningkatan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.

D. Program

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan disusun program sebagai berikut :

Tabel 8.38
Indikasi Program Prioritas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

No	Urusan		Pagu Indikatif				
	Program dan kegiatan prioritas		Dalam Jutaan Rupiah				
	Kerangka Regulasi	Kerangka Penganggaran	2011	2012	2013	2014	2015
1	Peningkatan keamanan dan Kenyamanan lingkungan		41,5	36,5	6,5	46,5	6,5
2	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		133	133	153	153	133
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran		474	494	474	474	484
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						599
			224	359	4762	599	0
5	Peningkatan Disiplin Aparatur		990	0	264	0	264
6	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		300	300	350	350	350
7	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan		10	10	10	10	10

8.2.20 Sekretariat Daerah

A. Permasalahan

Adapun secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas pada saat ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi masalah tapal batas dan belum tersertifikasinya lahan secara menyeluruh
2. Kurangnya koordinasi SKPD dalam perumusan kebijakan Kepala Daerah.
3. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan aparatur untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya

4. Minimnya produk hukum daerah dalam mendukung kebijakan Kepala Daerah
5. Belum optimalnya fungsi kelembagaan OPD terkait belum tertatanya kelembagaan, prosedur tata kerja dan uraian tugas masing-masing SKPD
6. Kurangnya koordinasi bidang keagamaan
7. Masih minimnya pelayanan administrasi perkantoran
8. Masih belum terpenuhinya sarana publikasi, informasi dan media massa
9. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang memadai
10. Belum optimalnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
11. Belum maksimalnya penyusunan dan pengendalian administrasi dan program pembangunan dan pelaporan capaian kinerja administrasi keuangan
12. Kurangnya koordinasi lintas sektoral bidang ekonomi dan belum optimalnya sosialisasi dalam rangka meningkatnya perekonomian daerah.

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan sasaran sebagai berikut.

Tabel 8.39
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Instansi/SKPD Sekretariat Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

Sasaran SKPD	Indikator kinerja utama	Rencana target capaian kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Kegiatan	9 kali	9 kali	9 Kali	9 Kali	9 Kali
2. Meningkatnya Kualitas Koordinasi	Jumlah Frekuensi Kegiatan	39 kali	39 kali	39 kali	39 kali	39 kali
3. Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Daerah	Jumlah Kegiatan	2 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan	45 kali	55 kali	55 kali	55 kali	55 kali
	Jumlah Sertifikasi Aset Pemda	20 persil	20 persil	10 persil	10 persil	10 persil
	Jumlah Sertifikasi Tanah Masyarakat Miskin	1000 persil	1000 persil	1000 persil	1000 persil	1000 persil
	Jumlah Kepastian Hukum	4 kasus	5 kasus	5 kasus	4 kasus	2 kasus
	Jumlah Raperda kecamatan	2 kec.	2 kec.	2 kec.	2 kec.	2 kec.
	Jumlah Raperda Desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa
	Jumlah Kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	-	-
5. Meningkatnya Kualitas SDM	Jumlah Frekuensi	3 kali	2 kali	2 kali	1 kali	1 kali
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
7. Mengembangkan fungsi, kapasitas dan kapabilitas kelembagaan serta kualitas SDM aparatur pemerintah	Jumlah OPD	8 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	6 SKPD
	Jumlah Uraian Tugas Pegawai	8 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	6 SKPD
	Jumlah Honor Pegawai Tidak Tetap	111 org	111 org	111 org	111 org	111 org
	Jumlah Pelatihan SDm	111 org	111 org	111 org	111 org	111 org
	Jumlah Workshop	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali

Sasaran SKPD	Indikator kinerja utama	Rencana target capaian kinerja					
		2011	2012	2013	2014	2015	
	Jumlah Aparatur Dalam Membuat SOP	40 org	40 org	40 org	-	-	
	Jumlah SDm Dalam Analisa Beban	40 org	40 org	40 org	-	-	
	Jumlah Unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	
	Jumlah Standar Pelayanan SKPD	10 SKPD	10 SKPD	18 SKPD	-	-	
	Jumlah SOP Kegiatan Layanan	20 keg	20 keg	25 keg	30 keg	30 keg	
	Jumlah Tolak Ukur	4 bid. layanan	4 bid. layanan	4 bid. layanan	4 bid. layanan	4 bid. layanan	
8.	Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Lakip	15 dok.	15 dok.	15 dok.	15 dok.	
9.	Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Bagi Usaha Kecil Menengah	Jumlah Kelompok Usaha	15 kelomp	15 kelomp	15 kelomp	30 kelomp	40 kelomp
10.	Meningkatnya pengenalan Produk Unggulan Daerah di Tingkat nasional Maupun Internasional	Jumlah Kelompok Usaha	15 kelomp	20 kelomp	27 kelomp	34 kelomp	45 kelomp
11.	Termanfaatnya Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Kegiatan Perekonomian	Jumlah Kelompok Usaha	30 Kelomp	38 kelomp	40 kelomp	45 kelomp	50 kelomp
12.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan di Setiap SKPD	Frekuensi Kunjungan Tim Pemeriksa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan	514 kali	550 kali	600 kali	620 kali	650 kali
13.	Meningkatnya Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Adanya Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan	270 buku	300 buku	320 buku	350 buku	400 buku
14.	Meningkatnya E. Procurement	Adanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	1 unit server, 26 unit komputer dan mebeleur	Operasional dan penunjang	Operasional dan penunjang	Operasional dan penunjang	Operasional dan penunjang
15.	Meningkatnya SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sertifikasi	12 org	17 org	22 org	27 org	30 org
16.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Untuk Kelancaran Tugas Kelapangan	Jumlah Unit kendaraan Operasional	1 unit mobil	2 unit Mobil	3 unit mobil	3 unit mobil	3 unit mobil
17.	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Proyek yang Bersumber dari APBD Kabupaten	Jumlah Pengawasan	514 kali	550 kali	600 kali	620 kali	650 kali
18.	Meningkatnya Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Sesuai dengan Peraturan Berlaku	Jumlah Buku	270 buku	300 buku	320 buku	350 buku	400 buku
19.	Meningkatnya layanan	Jumlah sarana layanan	1 Unit	Operasional dan	Operasional	Operasio	Operas

Sasaran SKPD	Indikator kinerja utama	Rencana target capaian kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
pengadaan barang dan jasa secara elektronik	barang dan jasa secara elektronik	Server, 26 Unit Komputer dan mobiler	Peralatan Penunjang	dan Peralatan Penunjang	nal dan Peralatan Penunjang	ional dan Peralatan Penunjang
20. Meningkatnya sarana dalam melaksanakan tugas di lapangan	Jumlah sarana	1 Unit Mobil Double Cabin	2 Unit Mobil Double Cabin	3 Unit Mobil Double Cabin	3 Unit Mobil Double Cabin	3 Unit Mobil Double Cabin
21. Meningkatnya PNS yang lulus sertifikasi barang dan jasa	Jumlah PNS yang lulus sertifikasi barang dan jasa	12 Orang	17 Orang	22 Orang	27 Orang	30 Orang
22. Meningkatnya pembinaan terhadap penyedia barang dan jasa	Jumlah Badan Usaha yang dibina	30 Badan Usaha	40 Badan Usaha	45 Badan Usaha	50 Badan Usaha	60 Badan Usaha
23. Meningkatnya pembinaan berbasis agama terhadap masyarakat	Jumlah desa / kecamatan yang dibina	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa
24. Meningkatnya pelaksanaan MTQ	Frekuensi pelaksanaan MTQ	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
25. Meningkatnya pemahaman tentang pelaksanaan ibadah haji yang benar	Frekuensi manasik haji bagi jema'ah calon haji	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
26. Meningkatnya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis	22 buku	24 buku	26 buku	28 buku	30 buku
27. Tersedianya laporan neraca awal SKPD	Jumlah laporan neraca awal SKPD	10 buku	12 buku	15 buku	17 buku	20

C. Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan dengan strategis / bagaimana cara mencapai tujuan, maka akan ditempuh dengan upaya kebijakan, yang merupakan arah yang diambil / ditempuh oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Menurut targetnya maka kebijakan terdiri atas Kebijakan Internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program dan Kebijakan Eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi.

D. Program

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan disusun program :

Tabel 8.40
Indikasi Program Prioritas Instansi / SKPD Sekretariat Daerah
Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1000	1025	1050	1000	950
02	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	450	450	500	550	650
03	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	650	300	300	300	300
04	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	1100	1.250	1.250	1.250	1.250
05	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	1700	1700	1700	1700	1700
06	Program Penatagunaan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Penguasaan Tanah	4100	3.700	3.700	3.700	3.700
07	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	500	500	400	-	-
08	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	950	650	700	350	400
09	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	300	300	350	400	450
10	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	450	450	450	450	375
11	Program Peningkatan Pelayanan Publik dan dan Prosedur Kerja	550	550	700	450	450
12	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	65	65	65	65	65
13	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	250	250	150	100	75
14	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	994	-	-	-	500
15	Program Kerjasama Pembangunan	200	200	225	250	275
16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	300	300	300	300	300
17	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	150	100	100	100	150
18	Program Pengembangan Data/Informasi	90	-	-	-	-
19	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	100	100	75	50	-
20	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	300	200	200	200	250
21	Peningkatan Administrasi Pembangunan kegiatan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Adm Pembangunan	125	135	145	155	165
22	Peningkatan Administrasi Pembangunan kegiatan Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Melalui Layanan Secara Elektronik	1.000	250	250	200	200
23	Peningkatan Administrasi Pembangunan kegiatan Sewa Kendaraan Operasional Double Cabin	100	100	110	110	120
24	Peningkatan Administrasi Pembangunan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Bidang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa	150	165	180	195	210
25	Peningkatan Administrasi Pembangunan kegiatan Pembinaan Terhadap Penyedia Barang/Jasa	250	265	280	295	310
26	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	100	189	121	132	146
27	Pembinaan Berbasis Agama Desa Khusus	172	935	208	229	251

8.2.21 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

A. Permasalahan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam menyelenggarakan

fungsi, tugas dan wewenangnya. Secara organisasi Sekretariat DPRD dipimpin oleh satu orang kepala Sekretariat yaitu Sekretaris DPRD. Permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas dapat diklasifikasikan berdasarkan aspek kelembagaan / struktur organisasi, aspek sumber daya manusia dan aspek kelengkapan kerja sebagai berikut:

1. Kepegawaian
 - Peningkatan SDM Aparatur Sekretariat DPRD dan Tenaga Teknik / Ahli (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pustakawan, Arsiparis dan Akuntan).
 - Jumlah pegawai yang berlebihan dari kebutuhan.

2. Sarana dan Prasarana

Masih kurangnya Ruang-ruang Rapat dan Ruang Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam rangka menunjang pelaksanaan kinerja dewan antara lain :

 - Ruang Rapat dan kerja Banmus
 - Ruang Rapat dan kerja Fraksi-fraksi
 - Ruang Rapat dan kerja Bangar
 - Ruang Rapat dan kerja Badan Legislasi
 - Ruang Rapat dan kerja Badan Kehormatan
 - Ruang Rapat dan kerja Komisi-komisi
 - Ruang Rapat dan kerja Pansus-pansus
 - Ruang Rapat dan kerja Sekretariat DPRD
 - Instalasi Listrik dan Air (PAM)
 - Ruang Arsip

3. Peralatan dan Perlengkapan

Kurangnya Peralatan dan Perlengkapan kantor guna menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD antara lain : Alat mobileur (meja/kursi rapat dan kerja), Sound system, AC, Komputer, Infokus, dan lain-lainnya yang menunjang kegiatan Dewan.

4. Fasilitas Anggota DPRD

Kendaraan dinas operasional DPRD, rumah dinas dewan.

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 8.41
Rencana Tingkat Capaian Sekretarisat Dewan Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2011-2015

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Meningkatnya jumlah Perda yang disahkan	Perda Kab. Musi Rawas yang dikeluarkan	32 Perda	45 Perda	50 Perda	56 Perda	60 Perda
2. Pengawasan pelaksanaan dan permasalahan pembangunan,	Frekuensi Dialog unsur masyarakat / Pemerintah	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
3. Meningkatkan pelaksanaan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rapat Komisi-komisi, Rapat Banmus, Bangar, Badan Legislasi, Fraksi dan Badan Kehormatan	252 kali	354 kali	394 kali	441 kali	473 kali
4. Meningkatkan Rapat-rapat Paripurna.	Rapat-Rapat Paripurna	45 kali	63 kali	70 kali	78 kali	85 kali
5. Penjaringan aspirasi (Reses)	Reses	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali
6. Kunjungan ke daerah dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas	Kunjungan kerja ke daerah-daerah	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali
7. Meningkatkan Jumlah Tenaga Staf Ahli DPRD	Jumlah Staf ahli	7 orang	8 orang	8 orang	9 orang	10 orang
8. Terselenggaranya Study Banding, koordinasi dan konsultasi	Data-data, Informasi, permasalahan.	28 Kali	28 Kali	28 Kali	28 Kali	28 Kali
9. Meningkatkan kualitas SDM Sekretariat DPRD	Pegawai yang telah mengikuti Bimtek/Workshop sesuai bidang kompetensinya.	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
	Terselenggaranya cerama Agama	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
10. Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efektif.	Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
	Tersusunnya Laporan Kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%
11. Meningkatkan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai.	40%	30%	30%	-	-
	Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%

C. Arah Kebijakan

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun arah kebijakan sebagaimana berikut:

1. Terlaksananya kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan.
2. Terlaksananya Rapat – rapat Paripurna
3. Adanya Perda Kabupaten Musi Rawas yang disahkan oleh DPRD baik perda dari eksekutif maupun Perda Inisiatif.
4. Memantau daerah-daerah, Bencana, serta permasalahan yang ada di masyarakat.
5. Penjaringan aspirasi masyarakat.
6. Adanya koordinasi/dialog antara Pemda, Tokoh Masyarakat, Pemuda / Agama dengan Anggota DPRD.
7. Terlaksananya peningkatan Kapaitas Dewan dan Aparatus Sekretariat DPRD (SDM/wawasan).
8. Adanya Kunjungan Kerja / Studi Banding dan Koordinasi dalam rangka mendapatkan masukan-masukan, informasi / data yang dibutuhkan oleh Dewan.

9. Tersedianya sarana dan prasaranan serta peralatan dan perlengkapan kantor.

D. Program

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan disusun program prioritas :

Tabel 8.42
Indikasi Program Prioritas Sekertariat Dewan Kerangka Pendanaan
Tahun 2011-2016

No	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	38809	261415	27435	28785	24065
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1750	1837	1929	2025	2126
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	760	798	837	879	437
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	270	283	297	312	330

8.2.22 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

A. Permasalahan

Pemasalahan yang dihadapi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah lima tahun ke depan adalah

1. Belum optimalnya penerimaan daerah
2. Kurangnya akuntabilitas pengelolaan keuangan
3. Belum ekonomi, efisien dan efektif pelaksanaan anggaran
4. Belum tertibnya pengelolaan aset daerah
5. Belum optimalnya Pelayanan publik yang cepat dan efisien (prima)
6. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang masih rendah
7. Kurangnya kesadaran wajib pajak

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan sasaran :

Tabel 8.43
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Meningkatnya penerimaan daerah	Realisasi penerimaan daerah setiap tahun bertambah.	7 %	7 %	7,5 %	8 %	8.5 %
2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan	Penyampaian laporan keuangan SKPD tepat waktu	30 SKPD	35 SKPD	40 SKPD	45 SKPD	50 SKPD
3. Penerapan prinsip ekonomi, efisien, efektif dan kepatutan	Jumlah SKPD yang telah menerapkan prinsip value	15 SKPD	20 SKPD	25 SKPD	30 SKPD	35 SKPD

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
dalam pelaksanaan anggaran	for money					D
4. Meningkatnya tertib pengelolaan/ manajemen aset daerah	Jumlah SKPD yang tertib dalam pengelolaan/ manajemen aset daerah	30 SKPD	35 SKPD	45 SKPD	50 SKPD	57 SKPD
5. Optimalnya Pelayanan publik yang cepat dan efisien (prima)	Terlaksananya Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelayanan publik	35 %	45 %	55 %	65 %	75 %
6. Meningkatnya ketersediaan regulasi pengelolaan keuangan	Rasio ketersediaan PNS yang telah mengikuti bintek	90%	92,5%	95%	97,5%	100%
7. Adanya kesadaran wajib pajak	Jumlah kesadaran wajib pajak meningkat	20 %	30 %	40 %	50 %	70 %

C. Arah Kebijakan

Dalam meningkatkan capaian kinerja sasarantersebut di atas, ditetapkan arah kebijakan:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan
3. Melakukan penggalan potensi penerimaan daerah.
4. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah
5. Melakukan penertiban pengelolaan aset daerah
6. Melakukan penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP)
7. Meningkatkan kualitas SDM aparatur
8. Melakukan penyuluhan kepada para wajib pajak dan retribusi daerah.
9. Menerapkan *value for money* (ekonomi, efisien dan efektif).

D. Program

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan disusun program :

Tabel 8.44
Indikasi Program Prioritas Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah
Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2016

No	Urusan Program dan Kegiatan Prioritas		Pagu Indikatif				
	Kerangka Regulasi	Kerangka Penganggaran	2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Peningkatan Kapasitas SDM		830	830	905	955	980
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		575	575	650	650	725
3	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		5655	5380	7605	5880	5880

8.2.23 Inspektorat

A. Permasalahan

Permasalahan utama yang dihadapi yaitu : kualitas sumber daya manusia aparatur pengawas masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang terbatas.

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan sasaran :

Tabel 8.45
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2011-2015

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Terlaksananya pengawasan internal secara berkala	Jumlah obyek pemeriksaan (obrik)	66	66	66	66	66
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur pengawas	Jumlah pegawai yang lulus ujian sertifikasi JFA	10 orang	12 orang	15 orang	18 orang	20 orang
	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis	10 orang	12 orang	15 orang	18 orang	20 orang
3. Menurunkan angka rekomendasi hasil pemeriksaan secara berkala	Jumlah rekomendasi inspektorat Kab. Musi Rawas	357	307	290	261	198
	Jumlah temuan inspektorat Prov. Sumatera Selatan	61	54	49	45	41
	Jumlah temuan BPKP	20	17	15	13	10
	Jumlah temuan BPK	10	9	8	7	5
4. Menurunkan angka kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Kab. Musi Rawas	Jumlah kasus pengaduan	50	45	40	35	30
5. Pelaksanaan Koordinasi pengawasan secara lebih komprehensif	Jumlah pelaksanaan koordinasi	20 kali	22 kali	25 kali	27 kali	30 kali
6. Pelaksanaan Pemerintah yang akuntabel	LAKIP Kab. Musi Rawas	75 Lapo	75 Lap	75 Lap	75 Lap	75 Lap
	Evaluasi LAKIP SKPD	75 Lapo	75 Lap	75 Lap	75 Lap	75 Lap
7. Penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan	Jumlah jenis naskah akademik kebijakan system dan prosedur pengawasan	1 dokumen	-	-	-	-
	Jumlah jenis naskah kebijakan system dan prosedur pengawasan	1 dokumen	-	-	-	-
	Program kerja pengawasan Tahunan	15 buku	15 buku	15 buku	15 buku	15 buku

C. Arah Kebijakan

Dalam meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut di atas, ditetapkan arah kebijakan:

1. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur,
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawas
3. Melaksanakan pengawasan internal secara berkala;
4. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
5. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan
6. Peningkatan pelayanan dan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
7. Penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan;
8. Mendukung aksi-aksi percepatan pemberantasan korupsi

D. Program

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana berikut.

Tabel 8.46
Indikasi Program Prioritas Inspektorat Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2016

No	Urusan Program Dan Kegiatan Prioritas		Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
	Kerangka Regulasi	Kerangka Penganggaran	2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.318,40	1.350,30	1.400,25	1.510,25	1.575,50
	-	-	1.318,40	1.350,30	1.400,25	1.510,25	1.575,50
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		280,75	310,80	420,60	530,66	550,70
	-	-	280,75	310,80	420,60	530,66	550,70
3	Program Peningkatan System Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		3.935,00	4.106,33	4.251,31	4.431,91	4.592,81
	-	-	3.935,00	4.106,33	4.251,31	4.431,91	4.592,81
4	Program Peningkatan Profesionalitas Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan		500,00	525,50	550,50	580,00	600,50
	-	-	500,00	525,50	550,50	580,00	600,50
5	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		575,00	165,00	170,00	175,00	185,00

8.2.24 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

A. Permasalahan

Pemasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan lima tahun ke depan adalah:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan kepada *Customer* (Pegawai di Lingkungan Pemkab. Musi Rawas)
2. Belum adanya sistem pola karier yang jelas untuk dijadikan pedoman bagi pegawai melalui sistem karier berbasis kinerja
3. Kurangnya perencanaan, evaluasi / monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan kepegawaian khususnya dibidang Jabatan
4. Belum Optimalnya pemenuhan akan kebutuhan diklat pegawai baik struktural, Fungsional maupun Teknis
5. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai melalui sistem tunjangan
6. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM
7. Belum terbangunnya Sistem Kepegawaian melalui penerapan Teknologi Informasi
8. Orientasi sebagian besar pegawai pada Jabatan Struktural;
9. Belum dilakukannya Pemetaan kepegawaian pada setiap unit kerja sebagai bahan untuk analisis dan menentukan berapa kebutuhan pegawai setiap SKPD khususnya kebutuhan riil Jabatan Fungsional Guru, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan sasaran sebagai berikut

Tabel 8.47
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

Sasaran SKPD	Indikator kinerja utama	Rencana target capaian kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Meningkatkan efektifitas, Koordinasi serta pengelolaan administrasi di BKPP	Terpenuhinya standar pelayanan administrasi perkantoran					
	Terlaksananya jasa surat menyurat setiap tahun	2200 surat	2500 surat	2700 surat	3000 surat	3500 surat
	Terlunasinya tagihan rekening telpon, air dan listrik untuk setiap bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Terlunasinya setoran wajib setiap tahun untuk kendaraan dinas	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang
	Terciptanya tempat dan lingkungan kerja yang indah, rapi dan sehat	2 gedung	2 gedung	2 gedung	2 gedung	2 gedung
	Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai	60 unit	60 unit	60 unit	60 unit	60 unit
	Tersedianya penunjang pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun

Sasaran SKPD	Indikator kinerja utama	Rencana target capaian kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
	aparatur					
	Tersedianya penunjang pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan aparatur	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
	Tersedianya instalasi listrik yg memadai	instalasi listrik	instalasi listrik	instalasi listrik	instalasi listrik	instalasi listrik
	Tersedianya media informasi dan pedoman pelaksanaan tugas	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor dalam 1 tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Tersedianya makan dan minum/snack dalam menunjang pelaksanaan pelayanan terhadap aparatur	70 orang	70 orang	70 orang	70 orang	70 orang
	Informasi yang akurat guna pelaksanaan tugas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Informasi yang akurat guna pelaksanaan tugas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Terpenuhinya kebutuhan tenaga teknis perkantoran selama 1 tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai					
	Tersedianya gedung kantor yang layak dan indah	1 unit gedung	1 unit gedung			
	Tersedianya peralatan kerja untuk pelaksanaan tugas	10 unit	5 unit		5 unit	4 unit
	Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan tugas	perlengkapan kantor				
	Terpeliharanya gedung kantor dalam pelaksanaan tugas	1 tahun				
	Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda empat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang
2. Meningkatnya Sumber daya aparatur yang profesional dan disiplin	Menurunya Jumlah PNS Yang melakukan Pelanggaran Disiplin dan terlaksananya penyampaian LP2P	60 orang yang melakukan pelanggaran dan 5645 orang Menyampaikan LP2P	50 orang yang melakukan pelanggaran disiplin dan 5645 orang menyampaikan LP2P	40 Orang yang melakukan pelanggaran disiplin dan 5645 orang yang menyampaikan LP2P	30 Orang yang melakukan pelanggaran disiplin dan 5645 orang yang menyampaikan LP2P	20 Orang yang melakukan pelanggaran disiplin dan 5645 orang yang menyampaikan LP2P

Sasaran SKPD	Indikator kinerja utama	Rencana target capaian kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Meningkatnya jumlah PNS yang mendapat Piagam Penghargaan satya lencana dan meningkatnya jumlah PNS yang berkinerja Baik	110 orang yang mendapat satya lencana dan 5 orang berkinerja terbaik	143 orang yang mendapat satya lencana dan 5 orang berkinerja terbaik	195 orang yang mendapat satya lencana dan 5 orang berkinerja terbaik	255 orang yang mendapat satya lencana dan 5 orang berkinerja terbaik	332 orang yang mendapat satya lencana dan 5 orang berkinerja terbaik
	Terwujudnya Kualitas pelayanan Kepada PNS	140 SK Pensiun dan 140 Cideramata Bagi PNS	150 SK Pensiun dan 150 Cideramata Bagi PNS	216 SK Pensiun dan 216 Cideramata Bagi PNS	221 SK Pensiun dan 221 Cideramata Bagi PNS	443 SK Pensiun dan 443 Cideramata Bagi PNS
	Meningkatnya Disiplin Penggunaan Atribut Kepegawaian	80 % PNS yang memakai name Tag	-	-	-	80% PNS yang memakai Name Tag
	Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan aparatur Pemerintah	80% PNS yang mengetahui PP 53 Thn 2010	-	-	-	-
	Tersedianya Kartu Karis, Karsu, Taspen, Karpeg dan KPE	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya presentase PNS yang memahami peraturan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
3. Tersusunnya rumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan	Terwujudnya Rekomendasi Calon Pejabat Struktural	2000 orang PNS untuk jabatan struktural	2000 orang PNS untuk jabatan struktural	2000 orang PNS untuk jabatan struktural	2000 orang PNS untuk jabatan struktural	2000 orang PNS untuk jabatan struktural
	Terwujudnya Persentase Pejabat yang memenuhi persyaratan formal (sesuai kompetensi), Penempatan CPNS sesuai dengan formasi, Validnya usulan jabatan struktural dan terselenggaranya pelantikan pejabat	530 CPNS ke PNS, dan 5 kali pelantikan pejabat struktural	500 CPNS ke PNS, dan 5 kali pelantikan pejabat struktural	500 CPNS ke PNS, dan 5 kali pelantikan pejabat struktural	500 CPNS ke PNS, dan 5 kali pelantikan pejabat struktural	500 CPNS ke PNS, dan 5 kali pelantikan pejabat struktural
	Terwujudnya penetapan perpindahan PNS dari dan Keluar Pemkab. Musi Rawas dan Usulan Konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS Kab. Musi Rawas	200 PNS dan 40 Jab. Eselon II	200 PNS dan 40 Jab. Eselon II	200 PNS dan 40 Jab. Eselon II	200 PNS dan 40 Jab. Eselon II	200 PNS dan 40 Jab. Eselon II
	Terpenuhinya Perekrutan pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku (4 tahap seleksi)	300 formasi per tahun	300 formasi per tahun	300 formasi per tahun	300 formasi per tahun	300 formasi per tahun

Sasaran SKPD	Indikator kinerja utama	Rencana target capaian kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Terwujudnya efektifitas dan produktifitas sesuai dengan kebutuhan organisasi	57 SKPD. Puskesmas, SD, SMP, SMA	-	-	-	-
	Terciptanya sistem Kepegawaian yang mantap	10 Perbup	-	-	-	-
	Terwujudnya monitoring dan evaluasi penempatan PNS unsur staf dan jabatan struktural dan pengangkatan PNS dalam jab. Struktural	2100 pegawai dan 1327 jabatan struktural	2100 pegawai dan 1327 jabatan struktural	2100 pegawai dan 1327 jabatan struktural	2100 pegawai dan 1327 jabatan struktural	2100 pegawai dan 1327 jabatan struktural
	Terwujudnya monitoring dan evaluasi pengangkatan dan penempatan PNS dalam jab. Fungsional	5139 jabatan fungsional	5139 jabatan fungsional	5139 jabatan fungsional	5139 jabatan fungsional	5139 jabatan fungsional
4. Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat	Terciptanya Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Validasi data 8616 Pegawai dan Website Kepegawaian	Pelayanan Kepegawaian Sistem Online	On Line Ke ruang Bupati, Wabup, SEKDA	Terpeliharanya jaringan Simpeg dan website Online	Terpeliharanya jaringan Simpeg dan website Online
5. Meningkatnya kesejahteraan Pegawai	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan PNS	100% 2500 SK berkala	100% 3750 SK berkala	100 % 4000 SK berkala	100 % 4250 SK berkala	100% 4500 SK berkala
		100% 7000 Kartu cuti	-	-	-	-
		100 % 1500 SK	100 % 1500 SK	100 % 1500 SK	100 % 1500 SK	100 % 1500 SK

C. Arah Kebijakan

Dalam meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut di atas, ditetapkan arah kebijakan:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Optimalisasi Fungsi Pengawasan Melekat
3. Peningkatan Kapasitas Melalui Jalur Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Pengaturan dan Implementasi Kebijakan Manajemen Kepegawaian
5. Peningkatan Kesejahteraan PNS

D. Program

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana berikut.

Tabel 8.48
Indikasi Program Prioritas Badan Kepegawaan, Pendidikan dan Pelatihan
Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

NO	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1187	682	1033	736	1258
2	Program Pendidikan Kedinasan	2040	2040	2040	2040	2040
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	4980	4565	3945	3080	4285
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	4365	3150	2760	3095	3085

8.2.25 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

A. Permasalahan

Pemasalahan yang dihadapi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa lima tahun ke depan adalah

1. Masih rendahnya kualitas SDM aparatur Pemerintah Desa.
2. Lemahnya kapabilitas kepemimpinan Kepala Desa.
3. Belum optimalnya fungsi Lembaga Desa.
4. Belum optimalnya pemanfaatan TTG dalam peningkatan perekonomian desa
5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan sasaran sebagai berikut:

Tabel 8.49
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur Pemerintahan Desa.	Kepabilitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	50 Kades	50 Kades	50 Kades	50 Kades	77 Kades / Lurah
2.	Peningkatan fungsi Lembaga Desa dalam Pembangunan di Desa	Peran serta lembaga desa dalam pembangunan Hubungan kerja yang harmonis dengan Kepala Desa	100 Orang (BPD, PKK, Posyandu, Kr. Taruna dan Ormas lainnya)	100 Orang (BPD, PKK, Posyandu, Kr. Taruna dan Ormas lainnya)	100 Orang (BPD, PKK, Posyandu, Kr. Taruna dan Ormas lainnya)	100 Orang (BPD, PKK, Posyandu, Kr. Taruna dan Ormas lainnya)	100 Orang (BPD, PKK, Posyandu, Kr. Taruna dan Ormas lainnya)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
3.	Peningkatan Pemanfaatan TTG dalam perekonomian Desa	Peningkatan pendapatan masyarakat	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
4.	Peningkatan partisipasi masy. Dalam pembangunan	Peran serta masyarakat Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan organisasi desa	50 desa	50 desa	50 desa	50 desa	

C. Arah Kebijakan

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun arah kebijakan sebagaimana berikut:

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pembangunan sosial, politik, ekonomi dan budaya secara terencana
2. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur dan kelembagaan di tingkat perdesaan dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan menjawab persoalan-persoalan dalam masyarakat
3. Memantapkan formulasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan melalui koordinasi lintas SKPD guna mendukung terwujudnya pembangunan masyarakat terintegrasi dan sinergis
4. Meningkatnya potensi-potensi yang ada di masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya lokal untuk mencapai tujuan pembangunan
5. Membuka peluang berusaha bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup
6. Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan
7. Memaksiamalkan pengelolaan, pemanfaatan dan penguasaan teknologi tepat guna sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna pengembangan potensi ekonomi perdesaan
8. Meingkatkan pembinaan kelembagaan desa dan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat perdesaan
9. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pola pengembangan sistem pembangunan partisipatif

D. Program

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana berikut.

Tabel 8.50
Indikasi Program Prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kerangka
Pendanaan Tahun 2011-2015

No	Program prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program peningkatan keberdayaan masy. Desa	930	1280	1355	730	755
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	470	525	575	650	670
3	Program Peningkatan partisipasi masy. Dalam membangun Desa	258	258	258	258	258
2	Program peningkatan kapasitas aparatur Pemdes	725	1075	725	1075	725
2	Program penguatan sekretariat BPMPD	1802	1802	1802	1802	1802
3	Program penguatan Bidang Pemerintahan Desa	3825	1600	1600	1600	3150
4	Program penguatan Bidang Teknologi Tepat Guna	1075	1075	1075	1075	1075
5	Program penguatan Bidang UED dan Sosbud	1180	1005	1330	1145	1480
6	Program penguatan bidang penanggulangan kemiskinan	3825	3600	3600	3600	3950

8.2.26 Kantor Perpustakaan , Arsip dan Dokumentasi

A. Permasalahan

Pemasalahan yang dihadapi Kantor Perpustakaan , Arsip dan Dokumentasi lima tahun kedepan adalah:

1. Kurangnya sumber daya manusia aparatur di bidang perpustakaan dan kearsipan
2. Masih terbatasnya sarana pendukung terutama di bidang perpustakaan dan arsip.
3. Masih rendahnya rasa ingin tahu masyarakat tentang ilmu pengetahuan melalui perpustakaan.
4. Belum optimalnya sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya wawasan yang luas melalui media.
5. Masih rendahnya minat baca masyarakat.
6. Belum memasyarakatnya pelayanan perpustakaan dan jasa kearsipan kepada publik (instansi/organisasi, masyarakat)
7. Belum optimalnya pengelolaan sistem administrasi kearsipan

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan sasaran sebagai berikut.

Tabel 8.51
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan	Jumlah petugas pengelola perpustakaan	6 Orang	8 Orang	10 Orang	11 Orang	12 Orang
2	Meningkatnya jumlah pengelola Kearsipan	Jumlah tenaga pengelola kearsipan	5 Orang	7 Orang	9 Orang	11 Orang	12 Orang
3	Meningkatnya Desa dan kelurahan yang cerdas	Jumlah masyarakat desa dan kelurahan yang mempunyai minat baca	1.335 Orang	1.816 Orang	2.332 Orang	2.887 Orang	3.479 Orang

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
4	Meningkatnya pengelola perpustakaan yang profesional	Jumlah pengelola perpustakaan yang profesional	35 Orang	70 Orang	105 Orang	140 Orang	175 Orang
5	Meningkatnya jumlah pengelola kearsipan yang profesional	Jumlah pengelola kearsipan yang profesional	40 Orang	80 Orang	120 Orang	160 Orang	200 Orang
6	Pelayanan Perpustakaan Desa dan Kelurahan.	Jumlah perpustakaan desa dan kelurahan yang dibina	27 Perpus	37 Perpus	47 Perpus	58 Perpus	68 Perpus
7	Tertatanya kearsipan yang baik.	Jumlah SKPD yang arsipnya tertata dengan baik	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD
8	Terciptanya kenyamanan pengelola arsip	Jumlah petugas pengelola arsip yang mendapat perlindungan kesehatan dan keselamatan	5 Orang	7 Orang	9 Orang	11 Orang	12 Orang

C. Arah Kebijakan

Untuk mengatasi kelemahan internal dan memanfaatkan peluang yang ada di luar, serta untuk mengantisipasi perubahan di masa depan perlu disusun langkah-langkah dalam bentuk kebijaksanaan yang dibuat tentunya harus dapat mengkoordinir antara kepentingan KPAD Kabupaten Musi Rawas sebagai komponen pengelola Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dengan kepentingan masyarakat.

Adapun beberapa kebijaksanaan yang akan ditetapkan antara lain :

1. Mengintensifkan Kearsipan menjadi sumber informasi dan data.
2. Mengembangkan Perpustakaan Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan.
3. Mendidik Petugas Pengelola Perpustakaan Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan.
4. Mengembangkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat.
5. Pelestarian Bahan Pustaka dan Kearsipan.

D. Program

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana berikut :

Tabel 8.52
Indikasi Program Prioritas Kinerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

No	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	762,71	368,6	379	799,4	432,72
2	Program Perbaikan sistem administrasi Kearsipan dan Dokumentasi	229	235	247,29	252,29	266,6

8.2.27 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

A. Permasalahan

Pemasalahan yang dihadapi Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura lima tahun ke depan adalah:

Faktor Eksternal :

1. Persaingan kepentingan penggunaan air irigasi untuk non pertanian pangan sangat tinggi
2. Infrastruktur dasar sektir pertanian belum memadai (jaringan irigasi primer, sekunder, tersier) JITUT, JIDES dan JUT
3. NTP komoditas non pertanian pagan lebih tinggi dibandingkan dengan NTP pertanian pangan
4. Home industri pengolah hasil palawija dan buahan belum berkembang
5. Lembaga mitra perbenihan belum optimal
6. Lembaga penggerak penyadaran pelaksanaan zakat pertanian belum optimal
7. Kinerja lembaga mitra belum

Faktor Internal :

1. Keterbatasan SDM Dinas TPH, baik kualitas maupun kuantitas

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan sasaran sebagai berikut

Tabel 8.53
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Musi Rawas 2011-2015

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Memberikan bantuan saprotan Pembinaan budidaya pertanian Terpadu kepada petani sangat miskin	Jumlah petani sangat miskin yang meningkat pendapatannya dari budidaya TPH	400 orang	467 orang	533 orang	600 orang	667 orang
2. Memberikan bantuan saprotan, pengoptimalisasi lahan, penguatan kelembagaan dan pembinaan budidaya pertanian terpadu	Jumlah petani miskin yang meningkat pendapatnya dari budidaya TPH	1.000 orang	1.333 orang	1.667 orang	2.000 orang	2.333 orang
3. Pengoptimalan lahan petani melalui pemberdayaan infrastruktur lahan dan air serta fasilitasi sertifikasi dalam budidaya pertanian terpadu.	Jumlah petani hampir miskin peningkatan pendapatan dari budidaya TPH	750 orang	1.050 orang	1.350 orang	1.600 orang	1.800 orang
4. Optimalisasi lahan SDA	Termanfaatkannya lahan STD seluas 5.000 ha	1.000 Ha	1.000 Ha	1.000 Ha	1.000 Ha	1.000 Ha
5. Perluasan Areal Sawah	Terbukanya sawah baru untuk	200 Ha	250 Ha	600 Ha	1.000 Ha	1.500 Ha

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
	penanaman padi 3.550 ha					
6. Pengembangan JITUT	Jaringan irigasi tingkat usaha tani yang dibangun 50.000 m	7.500 m	7.500 m	10.000 m	10.000 m	15.000 m
7. Pengembangan JUT	Jalan Usaha Tani 25.000 m	5.000 m	5.000 m	5.000 m	5.000 m	5.000 m
8. Pengembangan lahan baru untuk balai benih	Luas lahan untuk calon balai benih yang dibuka (ha)	20 Ha	-	-	-	-
9. Peningkatan produksi benih padi UPTD Pembenuhan Tugumulyo dan Kelompok penangkar	Produksi Benih Bersertifikat (ton)	3.818 ton	3.873 ton	3.999 ton	4.037 ton	4.118 ton
10. Pengembangan alat pengolah pupuk organik (APPO)	Jumlah Kelompok APPO (unit)	5	3	2	2	2
	Jumlah pupuk organik yang diproduksi (ton/thn)	2.250	1.350	900	900	900
11. Meningkatkan rendemen hasil padi	Penurunan loses (%)	17	16	15	14	12
12. Meningkatkan mutu produk dan nilai tambah komoditi pertanian	Jumlah komoditi yang meningkatkan mutunya 20 jenis (Jenis)	2	5	9	14	20
13. Meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian petani dan pelaku agribisnis lainnya dalam usaha agro industri	Jumlah home industri pertanian yang melakukan pengolahan hasil (unit)	2	2	3	5	6

C. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, disusun arah kebijakan sebagaimana berikut

1. Pemantapan swasembada beras melalui peningkatan produksi berkelanjutan
2. Pengendalian lahan pertanian berkelanjutan, baik areal eksisting (irigasi teknis, non teknis) maupun areal pengembangan.
3. Pengembangan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani
4. Memantapkan penyediaan benih / bibit unggul, melalui revitalisasi Balai Benih dan Pemberdayaan kelompok penangkar benih / bibit.
5. Penguatan kelembagaan mitra (*stakeholder*) bidang pengairan (P3A, GP3A, IP3A), bidang Alsintan (UPJA), bidang pengendalian Organisme pengganggu tanaman (RPH) dan bidang pendanaan (perbankan/keuangan dan lembaga lainnya)
6. Penanganan pascapanen dan agroindustri
7. Pengembangan jaringan pasar hasil pertanian

8. Meningkatkan koordinasi teknis dengan lembaga terkait dalam rangka sosialisasi dan himbauan penuaian zakat pertanian melalui *stakeholders* mitra, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

D. Program

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana berikut

Tabel 8.54
Indikasi Program Prioritas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

No	Program prioritas		Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		5250	6884	8500	10060	11620
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		6300	3450	5900	3200	3500
3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian		600	1000	1200	1500	2100
4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		3100	2900	2400	2400	2400
5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		30900	32500	38700	41000	52500
6	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		900	900	900	900	900

8.2.28 Dinas Perkebunan

A. Permasalahan

Pemasalahan yang dihadapi Dinas Perkebunan dalam lima tahun ke depan adalah

1. Masih rendahnya penggunaan pupuk pada budidaya karet.
2. Masih rendahnya produksi dan penggunaan bibit unggul yang tersertifikasi dan berlabel.
3. Kurangnya kesadaran petani pekebun mengenai pentingnya penerapan teknik-teknik budidaya dan penanganan pasca panen yang baik sehingga kualitas dan kuantitas produk menjadi belum optimal.
4. Belum kuatnya kelembagaan-kelembagaan petani, baik koperasi maupun kelompok tani.
5. Belum optimalnya harga yang diterima petani.
6. Biaya sertifikasi lahan yang belum terjangkau oleh sebagian besar petani.
7. Belum optimalnya dukungan perbankan menyebabkan rendahnya serapan program revitalisasi perkebunan.
8. Adanya ancaman hama dan penyakit tanaman.
9. Masih banyaknya kebun-kebun karet tua yang belum diremajakan.
10. Koordinasi yang belum optimal dengan SKPD-SKPD sektor pertanian.
11. Masih adanya permasalahan seputar ganti rugi lahan antara investor dan masyarakat.
12. Akses jalan dari dan ke lokasi-lokasi perkebunan yang belum optimal.

13. Kontribusi subsektor perkebunan terhadap Pendapatan Asli Daerah belum optimal.

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan sasaran sebagai berikut.

Tabel 8.55
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2011-2015

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Perluasan areal perkebunan	Areal karet baru	3000 ha	3000 ha	3000 ha	3000 ha	3000 ha
	Areal sawit baru	8000 ha	8000 ha	8000 ha	8000 ha	8000 ha
	Areal kakao baru	50 ha	50 ha	50 ha	50 ha	50 ha
	Areal aren baru	50 ha	50 ha	50 ha	50 ha	50 ha
2. Penyediaan bibit-bibit komoditas perkebunan	Jumlah bibit karet disediakan	4,6 juta	4,6 juta	4,6 juta	4,6 juta	4,6 juta
	Jumlah bibit kakao disediakan	55 ribu	55 ribu	55 ribu	55 ribu	55 ribu
	Jumlah bibit kopi disediakan	100 ribu	100 ribu	100 ribu	100 ribu	100 ribu
3. Penguatan kelembagaan perbibitan/perbenihan	Jumlah kelompok tani yang bibit hasil produksinya tersertifikasi dan berlabel	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok
	Jumlah benih tersertifikasi yang dihasilkan per ha	25 ribu/ha	25 ribu/ha	25 ribu/ha	25 ribu/ha	25 ribu/ha
4. Peningkatan produktivitas perkebunan	KKK/ha/tahun	0.9	1	1.1	1.2	1.2
	TBS/ha/tahun	20	20	20	20	20
5. Peremajaan/rehabilitasi tanaman perkebunan	Luas lahan yang mengikuti program revitalisasi perkebunan	3863 ha	3839 ha	3700 ha	2800 ha	-
6.	Luas areal karet yang diremajakan oleh swadaya masyarakat (ha)	1137	1161	1300	2200	5000
7.	Luas areal kopi yang direhabilitasi	50 ha	50 ha	50 ha	50 ha	50 ha
8. Pemupukan tanaman karet	Jumlah pupuk (urea, SP36/TSP, KCL, organik) yang digunakan petani karet	22.300 ton	22.300 ton	22.300 ton	22.300 ton	22.300 ton
9. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) karet	Luas lahan karet yang dikendalikan OPT-nya baik oleh pemerintah kabupaten maupun swadaya masyarakat	1000 ha	1000 ha	1000 ha	1000 ha	1000 ha
10. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sawit	Luas lahan sawit rakyat yang dikendalikan OPT-nya baik oleh pemerintah kabupaten maupun swadaya masyarakat	100 ha	100 ha	100 ha	100 ha	100 ha
11. Peningkatan mutu hasil dan pemasaran karet	Jumlah kelompok unit pengolahan hasil (UPH) karet yang meningkat harga jual bokarnya	100 kelompok	100 kelompok	100 kelompok	100 kelompok	100 kelompok

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
12. Penyerapan tenaga kerja perkebunan	Jumlah tenaga kerja baru yang diserap kebun karet	3000 orang	3000 orang	3000 orang	3000 orang	3000 orang
	Jumlah tenaga kerja baru yang diserap kebun sawit	4000 orang	4000 orang	4000 orang	4000 orang	4000 orang
13. Pengembangan industri hilir perkebunan	Jumlah pabrik CPO baru dengan kapasitas masing-masing paling kurang 40 ton/jam	1	1	1	-	-
	Jumlah kecamatan yang dibangun pabrik CPO mini	4 kecamatan	4 kecamatan	5 kecamatan	4 kecamatan	4 kecamatan
	Jumlah pabrik crumb rubber baru dengan kapasitas terpasang masing-masing 66 ribu ton	1	1	-	1	-
14. Pembentukan KUD petani karet	Jumlah KUD yang dibentuk yang beranggotakan lima kelompok UPH	20	20	20	20	20
15. Penguatan KUD sawit plasma	Jumlah KUD sawit plasma yang meningkat harga jual TBS-nya	13	13	13	13	13
16. Penguatan kelompok tani revitalisasi perkebunan	Jumlah kelompok pemula yang meningkat menjadi kelompok madya/utama	16	16	16	16	16
17. Peningkatan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	87,27	88,14	89,02	89,91	90,81
18. Peningkatan kontribusi subsektor perkebunan terhadap PAD	Adanya Perda tentang retribusi sertifikasi dan pelabelan bibit	1	-	-	-	-
	Adanya Perda tentang retribusi/sumbangan pihak ketiga PBS	1	-	-	-	-

C. Arah Kebijakan

Dalam meningkatkan capaian kinerja sasarantersebut di atas, ditetapkan arah kebijakan: Perluasan areal perkebunan dilakukan dengan tetap memperhatikan ketersediaan dan daya dukung lahan di Kabupaten Musi Rawas.

Penyediaan bibit-bibit diarahkan untuk dipenuhi oleh kelompok-kelompok tani penangkar bibit sebagai satu bagian penguatan kelembagaan tani.

Peningkatan produktivitas perkebunan dilakukan secara terpadu baik dari sisi *on-farm* maupun *off-farm*.

D. Program

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana berikut :

Tabel 8.56
Indikasi Program Prioritas Dinas Perkebunan
Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

No	Urusan PROGRAM dan Kegiatan Prioritas		Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
	Kerangka regulasi	Kerangka penganggaran	2011	2012	2013	2014	2015
1	Program peningkatan kesejahteraan petani		1.435	1.535	1.635	1.735	1.835
2	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan		10.435	11.535	11.635	11.735	11.835
3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi		950	1005	1060	1090	1120
4	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan		6520	4152	7114	3506	3633
5	Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan		5450	5500	5550	5600	5650

8.2.29 Dinas Peternakan dan Perikanan

A. Permasalahan

Pemasalahan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Perikanan lima tahun ke depan adalah:

1. Menurunnya kualitas bibit dan benih
2. Rendahnya penguasaan teknologi dan informasi peternakan dan perikanan
3. Terbatasnya kemampuan akses permodalan
4. Masih adanya pemotongan hewan produktif
5. Masih adanya pencurian ternak dan *illegal fishing*

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 8.57
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Instansi / SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1 Meningkatkan produksi daging, telur dan ikan	Produksi daging (kg)	5.700.328	6.525.981	7.351.634	8.177.583	9.003.236
	Produksi telur (kg)	1.153.740	1.239.117	1.330.812	1.429.292	1.535.059
	Produksi ikan konsumsi (ton)	60.853,23	85.269,49	109.685,74	134.102,00	158.518,26
2 Menurunkan kasus kematian ternak	Angka kematian ternak (%)	6	5	4	3	3
3 Meningkatkan bantuan permodalan bagi peternak dan pembudidaya ikan	Kelompok yang mendapatkan modal dari swasta / perbankan	10	10	10	10	10
4 Meningkatkan ketrampilan dan manajemen usaha	Jumlah peternak / pembudidaya ikan / nelayan	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang
5 Meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi	Jumlah aparatur yang mengikuti	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
aparatur	pelatihan					

C. Arah Kebijakan

Dalam meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut di atas, ditetapkan arah kebijakan:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas perbibitan ternak dan pembenihan ikan
2. Peningkatan kesehatan hewan dan ikan serta kesehatan masyarakat veteriner
3. Peningkatan infrastruktur peternakan dan perikanan berwawasan lingkungan
4. Peningkatan akses pemasaran produksi peternakan dan perikanan
5. Peningkatan penerapan teknologi peternakan dan perikanan
6. Optimalisasi potensi sumberdaya lokal
7. Meningkatkan skala usaha ternak dan ikan
8. Meningkatkan aksesibilitas peternak, pembudidaya ikan dan nelayan terhadap sumber permodalan dan teknologi
9. Penguatan dan pengembangan kelembagaan
10. Penumbuhkembangan rumah tangga peternak, pembudidaya ikan dan nelayan pemula
11. Peningkatan kompetensi peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan swasta
12. Peningkatan kompetensi aparatur teknis dan administrasi
13. Peningkatan sarana dan prasarana teknis dan administrasi perkantoran
14. Peningkatan sistem prosedur pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel
15. Memfasilitasi pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi usaha peternakan dan perikanan yang berwawasan lingkungan.

D. Program

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana berikut

Tabel 8.58
Indikasi Program Prioritas Instansi / SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan
Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

No	Urusan Program dan Kegiatan Prioritas		Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
	Kerangka Regulasi	Kerangka Penganggaran	2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Pengembangan Budi Daya Perikanan		9635	39520	32160	70930	33365
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		600	650	700	800	850
3	Program Pengembangan Kawasan Budi Daya Laut / Air Payau dan Air Tawar		150	175	-	-	-
4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		14775	15070	16305	18365	21110
5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		14420	12755	13405	14670	15500
6	Program Pengembangan Data / Informasi		440	270	460	330	480
7	Program Pendampingan Tugas Perbantuan		540	560	580	590	600
8	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Industri Hilir dan Ekspor Hasil Pertanian		500	500	500	500	500

8.2.30 Kantor Ketahanan Pangan

A. Permasalahan

Pemasalahan yang dihadapi Kantor Ketahanan Pangan dalam lima tahun ke depan adalah:

1. Belum meratanya ketersediaan dan distribusi pangan antar waktu dan antar wilayah dikarenakan luasnya wilayah.
2. Belum optimalnya pengendalian cadangan pangan daerah.
3. Masih adanya daerah rawan pangan.
4. Belum beragamnya pola konsumsi pangan bergizi dan berimbang sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH). Dominannya pangan berbasis beras dan belum terealisasinya PPH Nasional
5. Masih kurangnya produktifitas dan kontuinitas penganekaragaman produk pangan olahan.
6. Masih rendahnya kesadaran produsen dan konsumen akan mutu dan keamanan pangan.
7. Masih kurangnya penerapan hasil kajian pangan.
8. Belum optimalnya partisipasi aparat/ masyarakat dalam pemberdayaan kelembagaan pangan.

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan sasaran sebagai berikut.

Tabel 8.59
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Kantor Ketahanan Pangan
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Berkembangnya Desa Mandiri Pangan, Lumbung pangan masyarakat dan Gerakan Kemandirian Pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan dan mengurangi jumlah penduduk rawan pangan	Jumlah Desa Mandiri Pangan, Lumbung Pangan dan Peralatan Lumbung	10 Desa Mapan, 10 lumbung, 10 Lantai Jemur, 10 unit peralatan lumbung	10 Desa Mapan, 12 lumbung, 12 Lantai Jemur, 12 unit peralatan lumbung	10 Desa mapan, 14 lumbung, 14 Lantai Jemur, 14 unit peralatan lumbung	10 Desa mapan 16 lumbung, 16 Lantai Jemur, 16 unit peralatan lumbung	10 Desa Mapan , 18 lumbung, 18 Lantai Jemur, 18 unit peralatan lumbung
2. Menguatnya kelembagaan distribusi pangan masyarakat dan terciptanya stabilisasi harga pangan pokok.	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang dibina	4 Gapoktan	3 Gapoktan	3 Gapoktan	3 Gapoktan	3 Gapoktan
3. Memasyarakatnya Penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan dalam rangka peningkatan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, serta aman.	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,3 %	86,5%	88,1%	90,6%	91,5%
4. Terciptanya masyarakat terampil dalam pengolahan pangan dan Berkembangnya usaha pangan masyarakat.	Jumlah Kelompok Usaha Kecil Bidang Pangan yang dibina	10 UKBP	10 UKBP	10 UKBP	10 UKBP	10 UKBP
5. Terkoordinasinya rumusan	Frekuensi	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali

kebijakan ketahanan pangan dalam kerangka Dewan Ketahanan Pangan	Koordinasi Tim Dewan Ketahanan Pangani					
------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--	--	--	--	--

C. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Kantor Ketahanan Pangan Mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 mengamanatkan pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan, serta menjelaskan tentang konsep ketahanan pangan, komponen dan pihak yang berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang dijabarkan dalam PP Nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan mengatur tentang ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, peran pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat, Pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional.
2. Kebijakan umum ketahanan pangan yang meliputi :
 1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan
 2. Mengembangkan Sistem Distribusi Pangan
 3. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan
 4. Membangun Sistem Pendukung Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Berbasis GIS

D. Program

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana berikut

Tabel 8.60
Indikasi Program Prioritas Kantor Ketahanan Pangan
Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

NO	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	6260	6212	6639	7176	7578

8.2.31 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

A. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan

1. Tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan SDM pertanian sebagian besar masih rendah
2. Kelembagaan petani dan penyuluhan belum berfungsi optimal
3. Terbatasnya teknologi spesifik lokasi

4. Sumberdaya alam belum dimanfaatkan secara optimal
5. Perubahan iklim global

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan sasaran sebagai berikut

Tabel 8.61

Rencana Tingkat Capaian Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani	Jumlah petani yang ditingkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilannya melalui bimbingan teknik (orang)	540 Org	630 Org	630 Org	630 Org	630 Org
	Jumlah petani yang ditingkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilannya melalui temu karya (Orang)	90 Org	90 Org	90 Org	90 Org	90 Org
	Jumlah petani yang ditingkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilannya melalui magang petani (Orang)	20 Org	20 Org	20 Org	20 Org	20 Org
2. Meningkatnya kemampuan dan jumlah penyuluh dan aparatur pertanian	Peningkatan kemampuan penyuluhan dan aparatur pertanian dalam berinovasi dan beraktivitas (orang)	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org
	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyuluhan melalui magang (orang)	100 kali	100 kali	100 kali	100 kali	100 kali
	Pelatihan rutin penyuluhan di UPTBP (kali)	468 Org	546 Org	546 Org	546 Org	546 Org
	Terbinanya desa-desa di Kabupaten Musi Rawas oleh 167 TKST penyuluhan dan 55 THL TBPP, 167 orang didandani daerah 55 orang didandani pusat (orang/desa)	222 Desa/Org	222 Desa/Org	222 Desa/Org	222 Desa/Org	222 Desa/Org
3. Meningkatnya kemampuan lembaga tani	Peningkatan kemampuan kelompok tani	180 Klmp	210 Klmp	210 Klmp	210 Klmp	210 Klmp
4.	Penubuhan dan peningkatan kemampuan gapoktan	100 Klmp	100 Klmp	100 Klmp	100 Klmp	100 Klmp
5. Meningkatnya kemampuan kelembagaan penyuluhan	Peningkatan fungsi unit pelaksanaan teknis balai penyuluhan (UPTBP)/BPP model	-	4 unit	4 unit	5 unit	6 unit
	Peningkatan umlah UPTBP di kecamatan	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit
	Tersedianya program penyuluhan tingkat kecamatan dan kabupaten	18	22	22	22	22
6. Tersedianya teknologi spesifik lokasi	Jumlah teknologi spesifik lokasi	52 Pkt	52 Pkt	52 Pkt	52 Pkt	52 Pkt
7. Meningkatnya	Intensitas diseminasi	4.336 kali	4.336 kali	4.336 kali	4.336 kali	4.336

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
akses petani terhadap informasi teknologi	informasi teknologi					kali
	Kerjasama dengan perguruan tinggi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
8. Tersebaranya teknologi terapan	Percontohan usaha tani	18 unit	25 unit	29 unit	34 unit	40 unit
	Penyebaran informasi dan teknologi melalui bahan cetak	20/20.000 (materi /lembar)	20/20.000 (materi /lembar)	20/20.000 (materi /lembar)	20/20.000 (materi /lembar)	20/20.000 (materi /lembar)
9. Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan	Pemasangan baleho	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
	Pembangunan gedung UPTBP	3 unit	4 unit	4 unit	5 unit	6 unit
	Rehabilitasi gedung UPTBP	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
	Tersedianya percontohan	6 ha	8 ha	8 ha	10 ha	12 ha
	Tersedianya alat peraga/praktek penyuluhan	18 Pkt	3 Pkt	4 Pkt	5 Pkt	6 Pkt
	Tersedianya sarana transportasi (roda dua) untuk petugas dan penyuluh	40 unit	20 unit	-	-	-
	Tersedianya mobil operasional penyuluh	2 unit	-	-	-	-

C. Arah Kebijakan

Adapun arah kebijakan pada Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan pertanian
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pertanian
3. Meningkatnya Pengkajian dan penerapan teknologi pertanian

D. Program

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana berikut.

Tabel 8.62

Indikasi Program / Kegiatan Prioritas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

No	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	3560	3585	3600	3625	3680
2	Program Peningkatan Kelembagaan Petani dan Penyuluhan	1185	1203	1217	1233	1252
3	Program pengkajian teknologi	598	600	620	630	640
4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi	8875	8738	5802	6247	7488

8.2.32 Dinas Kehutanan

A. Permasalahan

1. Luasnya lahan kritis
2. Pembukaan lahan sering dilakukan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah
3. Belum semua kawasan hutan baik batas luar maupun batas fungsi dilakukan tata batas
4. Kawasan hutan belum dikelola dalam unit-unit pengelolaan
5. Tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan (perambahan) maupun hasil-hasilnya, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan.
6. Adanya penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan yang tidak prosedural
7. Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak.
8. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas termasuk kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumberdaya manusia SDM, baik pada tatanan pemerintah serta masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.
9. Kurangnya sarana dan prasarana

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 8.63

Rencana Tingkat Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rehabilitasi Lahan Kritis (dalam Ha)	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000
2. Pemantapan kawasan hutan	Kawasan Hutan yang Mantap (Kelompok Hutan)	1	1	1	1	1
3. Percepatan pengelolaan kawasan hutan	Kawasan Hutan Tetap dikelola oleh Institusi permanen pada Tingkat Tapak (unit)	1	1	1	1	1
4. Peningkatan kesejahteraan rakyat sekitar & di dalam kawasan hutan	Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (Ha)	2000	3000	4000	5000	6.375
5. Peningkatan pemanfaatan potensi hutan	Pembangunan Hutan Tanaman Industri (unit)	5	5	5	5	5
6. Upaya perlindungan hutan	Berkurangnya kejadian kebakaran hutan	20%	20%	20%	20%	20%
7. Peningkatan PAD	Peningkatan PAD Sektor Kehutanan	630 jt	680 jt	720 jt	770 jt	820 jt
8. Peningkatan SDM penatausahaan hasil hutan	Fasilitasi dan Asistensi Tenaga Penguji Hasil Hutan	30 org	30 org	30 org	30 org	30 org

C. Arah Kebijakan

Dalam meningkatkan capaian kinerja sasarantersebut di atas, ditetapkan arah kebijakan:

1. Mendukung pembangunan sumber daya air (irigasi) melalui rehabilitasi daerah tangkapan air.
2. Menertibkan pengelolaan, pengurusan, dan pengaturan hutan dan kehutanan
3. Memberikan pembinaan terhadap aparatur
4. Mendukung pengembangan hutan kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa
5. Mendukung perbaikan pengelolaan SDA
6. Penetapan Institusi tingkat Tapak

C. Program

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana berikut.

Tabel 8.64
Indikasi Program / Kegiatan Prioritas Instansi / SKPD Dinas Kehutanan
Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

No	Program Prioritas		Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		494,65	1.230	1.370	1.510	1.650
2	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		1.702,94	2195	2350	2580	3170
3	Program Perlindungan dan Konservasi SDH		324,23	850,00	900,00	950,00	1015,0
4	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan		642,9	1380	1605	1852	2165

8.2.33 Dinas Pertambangan dan Energi

A. Permasalahan

Pemasalahan yang dihadapi Dinas Pertambangan dan Energi dalam lima tahun ke depan adalah

1. Menjangkau kantong – kantong produksi; Terbatasnya dana
2. Lokasi badan, balai ataupun tempat – tempat kursus bidang pertambangan dan energi yang masih terpusat di kota;
3. Kurangnya informasi kursus – kursus bidang pertambangan dan energi
4. Jumlah aparat / pegawai yang telah mengikuti kursus dan pendidikan teknis bidang pertambangan dan kelistrikan masih kurang;
5. Penempatan dan pembinaan pegawai kurang memperhitungkan keahlian;
6. Alokasi dana untuk biaya pendidikan aparat / pegawai masih minim.
7. Kemampuan pemerintah daerah di bidang keuangan masih sangat terbatas dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan penunjang bidang pertambangan dan

- energi sehingga harus dibuat skala prioritas;
8. Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan untuk menjangkau wilayah yang memiliki deposit mineral yang potensial
 9. Kemampuan pemerintah daerah dibidang keuangan masih sangat terbatas dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan penunjang bidang minyak dan gas sehingga harus dibuat skala prioritas;
 10. Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan untuk menjangkau wilayah yang memiliki deposit mineral yang potensial
 11. Kemampuan pemerintah daerah dibidang keuangan masih sangat terbatas dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan penunjang bidang kelistrikan sehingga harus dibuat skala prioritas;
 12. Kemampuan pemerintah daerah dibidang keuangan masih sangat terbatas dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan penunjang bidang geologi sehingga harus dibuat skala prioritas;
 13. Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan untuk menjangkau wilayah yang memiliki deposit mineral yang potensial.
 14. Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungsn untuk

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 8.65
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Dians Pertambangan dan Energi
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Pembangunan Jaringan Listrik dan Elektrifikasi	Persentase jumlah Desa Berlistrik	87%	92%	97%	100%	
2. Peningkatan PAD sektor Pertambangan	Terpenuhinya Kewajiban Perusahaan Pemegang IUP	70%	75%	80%	90%	100%
3. Melaksanakan Pengawasan Prinsip Good Mining Praticce	terciptanya penambangan yang baik	60%	70%	80%	90%	100%
4. Penyelesaian sengketa wilayah pertamabangan	% Penyelesaian sengketa wilayah pertambangan					
5. Inventarisasi dan Pemetaan Potensi Geologi	Meningkatkan Data Potensi dan Terlaksananya Penelitian tentang Potensi Bahan Galian Daerah.	100%	100%	100%	100%	100%

C. Arah Kebijakan

Percepatan pembangunan kawasan pertambangan melalui :

1. Peningkatan pengelolaan pertambangan dan energi melalui percepatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum
2. Percepatan pembangunan kelistrikan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan energy alternatif
3. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pemda kabupaten dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka pembangunan dan pembiayaan

4. Meningkatkan pelayanan publik dalam bidang perizinan usaha pertambangan, yang diharapkan mampu meningkatkan PAD sektor non migas

D. Program

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana berikut.

Tabel 8.66
Indikasi Program / Kegiatan Prioritas Dinas Pertambangan dan Energi
Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

No	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Pembinaan dan Pengawasan	210				
2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Migas Dan Energi	675				
3	Program Pengawasan dan Pengendalian Produksi	100				
4	Program Percepatan Produksi Migas dan Pengelolaan Sumur Tua	150				
3	Program Penyediaan Infrastruktur penunjang Kegiatan Pertambangan	700	100	100		
6	Program Peningkatan Penerimaan Daerah					
7	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	700	100	100		
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	30.428	28.150	28.800	23.950	4.410
9	Program Pembangunan Pembangkit Listrik :	2.000	0	0	0	0
10	Program Pengembangan Energi Alternatif :	2.860	6.430	1.380	430	330
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air :	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

8.2.34 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

A. Permasalahan

Keberadaan perindustrian, perdagangan diharapkan bisa berperan dalam menumbuhkan sektor perekonomian Daerah melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun demikian saat ini peran dimaksud belum sepenuhnya dapat diwujudkan, hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti :

1. Masih lemahnya SDM dalam pengelolaan usaha,
2. Terbatasnya modal kerja yang dimiliki koperasi dan usaha kecil menengah serta kelompok masyarakat lainnya,
3. Lemahnya kerjasama dan kemitraan antara pelaku usaha ekonomi, maupun dengan BUMN dan BUMD,
4. Belum optimalnya dukungan Pemerintah terhadap pengembangan sektor riil,
5. Belum dikembangkannya produk hasil industri yang memiliki keunggulan kompetitif dan efisien sehingga senantiasa kalah bersaing di pasaran,
6. Masih terbatasnya peraturan perundangan yang mengatur mengenai persaingan dunia usaha.

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka disusun sasaran beserta target capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 8.67
Rencana Target Capaian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Tahun 2011-2015

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA TARGET CAPAIAN KINERJA				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen akan hak dan kewajibannya	Pelaku usaha dan konsumen di 21 kecamatan	3 kec.	4 kec.	4 kec.	5 kec.	5 kec.
2. Meningkatnya tertib UTTP	Tertibnya UTTP di 21 kecamatan	3 kec.	4 kec.	4 kec.	5 kec.	5 kec.
3. Meningkatnya jumlah sertifikasi barang	Frekuensi pameran produk daerah	3 kali	3 kali	4 kali	4 kali	4 kali
4. Meningkatnya rasio industri rumah tangga terhadap total industri Kabupaten	Frekuensi pameran ekspor	-	1 kali	1 kali	2 kali	2 kali
5. Meningkatnya frekuensi pameran produk daerah	Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor	1 jenis	1 jenis	1 jenis	2 jenis	2 jenis
6. Meningkatnya amaran ekspor	Frekuensi fasilitasi kemitraan antara produsen dengan eksportir	1 kali	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali
7. Meningkatnya produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor	Jumlah IKM yang mendapat bantuan dana bergulir	15 usaha	20 usaha	25 usaha	25 usaha	25 usaha
8. Meningkatnya frekuensi fasilitasi kemitraan antara produsen dengan eksportir	Jumlah pasar kalangan yang dibangun	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit

C. Arah Kebijakan

Peningkatan Daya Beli Masyarakat merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berbasis investasi, agrobisnis guna menunjang industri. Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ditempuh dengan menciptakan lingkungan usaha yang sehat untuk meningkatkan peranan masyarakat.

D. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka ditetapkan program prioritas:

Tabel 8.68
Indikasi Program/Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2016

No	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	350,00	550,00	550,00	550,00	350,00
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	600,00	555,00	625,00	625,00	600,00
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	425,00	375,00	425,00	375,00	425,00
4	Program Penataan Struktur Industri	450,00	400,00	450,00	450,00	450,00
5	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
1	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
2	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1.125,00	1.075,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.500,00
5	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	425,00	525,00	475,00	475,00	425,00

8.2.35 Rumah Sakit dr. Sobirin

A. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh RS dr. Sobirin dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain :

1. Ketersediaan lahan untuk meningkatkan kapasitas fisik pelayanan kesehatan yang terbatas.
2. Keterbatasan dana untuk menyediakan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia terutama SDM spesialis untuk memenuhi persyaratan minimal dan SDM bersertifikat keahlian (gawat darurat, hemodialisa, perawatan intensif dan lain sebagainya).

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan sasaran sebagai berikut

Tabel 8.69
Rencana Tingkat Capaian Kinerja RS dr. Sobirin
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

Sasaran SKPD	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan.	a. Tingkat hunian / BOR (70 – 80 %)	70 – 80 %	70 – 80 %	70 – 80 %	70 – 80 %	70 – 80 %
	b. Lama perawatan / LoS (4 – 5 hari)	3,1	3,5	4	4 - 5	4 - 5
	c. Angka kematian kasar (50 - 60%)	60%	60%	58%	55%	53%
	d. Angka kematian ≥ 48 jam (< 15%)	18	18	16	15	< 15

	e. Pelayanan PONEK (%)	100	100	100	100	100	
	f. Pelayanan keluarga miskin (%)	100	100	100	100	100	
	g. Pelayanan penderita gizi buruk (%)	100	100	100	100	100	
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan	a. Kunjungan rawat jalan (kunjungan)	74.750	82.225	90.448	99.492	109.441
		b. Pasien rawat inap (orang)	14.375	15.813	17.394	19.133	21.046
3.	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan memenuhi standar keamanan	a. Penambahan fasilitas fisik	50 m ²	150 m ²	20 m ²	70 m ²	60 m ²
		b. Standar peralatan rawat jalan	75%	80%	80%	90%	100%
		c. Standar peralatan rawat inap	75%	80%	80%	90%	100%
		d. Standar peralatan instalasi penunjang medis	60%	65%	70%	75%	75%
4.	Terciptanya kepercayaan masyarakat	Indeks kepuasan pelanggan > 80%	65%	70%	75%	80%	> 80%
5.	Meningkatnya kemandirian rumah	Cost recovery > 60%	40%	45%	50%	55%	60%
6.	Terselenggaranya pengembangan SDM setiap profesi	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional 20 jam per orang per tahun	60%	70%	80%	90%	100%

C. Arah Kebijakan

Arah pembangunan RS dr. Sobirin sebagai pemberi pelayanan kesehatan rujukan adalah memberikan pelayanan kesehatan optimal yang berkeadilan, terjangkau dan aman

D. Program

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana berikut.

Tabel 8.70
Indikasi Program/Kegiatan Prioritas RS dr. Sobirin Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

No	Program Prioritas		Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		92	92	95	95	100	100
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		2.765	3.036	3.271	3.598	3.700	2.765
3	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		55	65	65	70	70	75
4	Program Pengembangan lingkungan sehat		138	0	0	0	0	0
5	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		590	685	798	1.023	870	590
6	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		265	280	285	299	311	265
7	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		400	50	100	100	100	400,
8	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		310	310	310	310	310	310
9	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		174	174	174	174	0,00	174

8.2.36 Rumah Sakit Rupit

RSUD Rupit, merupakan salah satu pemberian pelayanan publik di bidang kesehatan, yang kepemilikan pemerintah Kabupaten Musi Rawas, yang terletak di Kecamatan Rupit memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bermutu serta terjangkau semua lapisan masyarakat.

A. Permasalahan

Permasalahan RSUD Rupit adalah:

1. Masih kurang tenaga SDM kesehatan
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana
3. Belum lengkapnya peralatan medis sesuai dengan standar
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM secara profesionalisme bidang masing-masing
5. Peningkatan pelayanan penduduk miskin

B. Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan sasaran sebagai berikut

Tabel 8.71
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Rumah Sakit Rupit
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1. Peningkatan jumlah dan macam sumber daya manusia	Sumber daya manusi					
	Dr. Spesialis	1	1	1	2	-
	Dr. Umum	2	2	-	-	-
	Dr. Gigi	1	-	-	-	-
	S1 Akutansi	2	-	-	-	-
	S1 Ekonomi	-	1	-	-	-
	S1 Hukum	-	1	-	-	-
	S1 Kesmas	1	1	-	-	-
	S1 Komputer	1	1	-	-	-
	Akbid	1	2	2	-	-
	Atro	2	2	-	-	-
	Analisis	3	1			
	Anastesi	-	1	1	-	-
	Kesling	-	1	1	-	-
	Akzi	-	1	1	1	-
	Ass. Farmasi	2	2	2		
	Rekam Medik	2	2	1		
Adm RS	1	1				
Atem	-	1				
Ak kom	-	2				
STM Mesin	-	1	-	-	-	
SMA	1	1	-	-	-	

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rencana Target Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
2. Sarana dan prasarana kesehatan	Pembangunan ruang operasi	4	-	-	-	-
	Pembangunan ruang laboratorium	-	1	-	-	-
	Pembangunan ruang ICU	-	1	-	-	-
	Pembangunan ruang rehabilitasi	-	1	-	-	-
	Pembangunan ruang bayi/anak	-	1	-	-	-
	Pembangunan ruang bersalin	-	1	-	-	-
	Pembangunan ruang rawat inap	-	1	-	-	-
	Gedung gizi/dapur	-	1	-	-	-
	Gedung laundry	-	1	-	-	-
	Pembanguna gedung jenaza	-	1	1	-	-
	Pembangunan rumah dokter spesialis	5	-	-	-	-
	Pembangunan rumah jabatan	1	-	-	-	-
	Pembangunan asrama	1	-	-	-	-
	Pengadaan listrik	-	1	1	-	-
	Pengadaan saran air bersih	1	1	1	-	-
	Persediaan peralatan medis sesuai dengan standar	1	1	1	-	1
	Peningkatan pelatihan SDM	1	1	1	1	1
3. Mempersiapkan akreditasi rumah sakit	Melakukan pembinaan akreditasi RS 5 playanan dasar	1	1	1	1	-
4. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin	Meningkatnya pelayanan masyarakat miskin	1	1	1	1	1

C. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pengembangan dan penigkatan RSUD Rupit lima tahun ke depan

D. Program

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana berikut:

Tabel 8.72
Indikasi Program Prioritas RSUD Rupit Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

No	Program Prioritas	Pagu Indikatif Dalam Jutaan Rupiah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	75	80	95	1115	125
2	Program pengadaan dan saran dan prasarana aparatur	150	900	300	0,00	150
3	Program standarisasi pelayanan kesehatan	100	550	200	250	300
4	Program Pelayana Kesehatan Penduduk Miskin	100	125	150	175	200

VIII. FORMAT HALAMAN

8.1.	Sinkronisasi Prioritas Nasional Provinsi dan Kabupaten.....	1
8.2.	Program Prioritas SKPD.....	3
8.2.1	Dinas Pendidikan	3
8.2.2	Dinas Kesehatan	7
8.2.3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	11
8.2.4	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	13
8.2.5	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.....	15
8.2.6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	18
8.2.7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	19
8.2.8	Badan Lingkungan Hidup Daerah	24
8.2.9	Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil.....	30
8.2.10	Kantor Pemberdayaan Perempuan.....	32
8.2.11	Badan Keluarga Berencana	33
8.2.12	Dinas Sosial.....	36
8.2.13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39
8.2.14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	42
8.2.15	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan.....	45
8.2.16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	47
8.2.17	Dinas Pemuda dan Olahraga	50
8.2.18	Badan Kesbangpol dan Linmas	54
8.2.19	Satuan Polisi Pamong Praja.....	59
8.2.20	Sekretariat Daerah	60
8.2.21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	64
8.2.22	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	67
8.2.23	Inspektorat.....	69
8.2.24	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan.....	71
8.2.25	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	75
8.2.26	Kantor Perpustakaan , Arsip dan Dokumentasi.....	77
8.2.27	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura.....	79
8.2.28	Dinas Perkebunan.....	81
8.2.29	Dinas Peternakan dan Perikanan	84
8.2.30	Kantor Ketahanan Pangan	86
8.2.31	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan	87
8.2.32	Dinas Kehutanan	90
8.2.33	Dinas Pertambangan dan Energi	91
8.2.34	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.....	93
8.2.35	Rumah Sakit dr. Sobirin	95

8.2.36	Rumah Sakit Umum Daerah Rupit.....	97
Tabel 8.1	3
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.....		3
Tahun 2011-2015	3
Tabel 8.2	6
Indikasi Program / Kegiatan Prioritas Pendidikan dan Kerangka Pendanaan	6
Tahun 2011-2015	6
Tabel 8.3	8
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Musi Rawas		
Tahun 2011 - 2015	8
Tabel 8.4	10
Indikasi Program Prioritas Dinas Kesehatan dan Kerangka Pendanaan....		10
Tahun 2011-2015	10
Tabel 8.5	12
Rencana Target Capaian Kinerja Dinas PU Bina Marga Tahun 2011-2015		12
Tabel 8.6	13
Indikasi Program Prioritas Dinas PU Bina Marga dan Kerangka Pendanaan	13
Tahun 2011-2015	13
Tabel 8.7	13
Rencana Target Capaian Kinerja Dinas PU Pengairan Tahun 2011-2015 ...		13
Tabel 8.8	15
Indikasi Program Prioritas dinas PU Pengairan dan.....		15

Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015.....	15
Tabel 8.9.....	16
Rencana Target Capaian Kinerja Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2011-2015	16
Tabel 8.10.....	18
Pagu Indikatif PU Cipta Karya dan Tata Ruang 2011-2015.....	18
Tabel 8.11.....	18
Rencana Target Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2011-2015.....	18
Tabel 8.12.....	19
Indikasi Program / Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan Bappeda Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015.....	19
Tabel 8.13.....	20
Rencana Target Capaian Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015.....	20
Tabel 8.14.....	23
Pagu Indikatif Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2015	23
Tabel 8.15.....	26
Rencana Target Capaian Kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015.....	26
Tabel 8.16.....	30
Indikasi Program / Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015	30
Tabel 8.17.....	31
Rencana Target Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011-2015	31

Tabel 8.18	32
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015..	32
Tabel 8.19	32
Rencana Target Capaian Kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan Tahun 2011-2015	32
Tabel 8.20	33
Indikasi Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015...	33
Tabel 8.21	34
Rencana Target Capaian Kinerja Badan Keluarga Berencana Tahun 2011-2015	34
Tabel 8.22	36
Indikasi Program / Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015	36
Tabel 8.23	37
Rencana Target Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2011-2015	37
Tabel 8.24	39
Pagu Indikatif Dinas Sosial Tahun 2011 – 2015	39
Tabel 8.25	40
Rencana Target Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011-2015	40
Tabel 8.26	42
Indikasi Program / Kegiatan Prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015	42
Tabel 8.27	43
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015	43

Tabel 8.28	45
Indikasi Program Prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015	45
Tabel 8.29	46
Rencana Capaian Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 – 2015	46
Tabel 8.30	47
Indikasi Program Prioritas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015	47
Tabel	8.31
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 -2015	48
Tabel 8.32	49
Indikasi Program Prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015	49
Tabel 8.33	50
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 – 2015	50
Tabel 8.34	53
Indikasi Program / Kinerja Prioritas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015	53
Tabel 8.35	54
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015	54
Tabel 8.36	58

Indikasi Program Prioritas Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Musi Rawas Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015.....	58
Tabel 8.37	59
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 – 2015	59
Tabel 8.38	60
Indikasi Program Prioritas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015.....	60
Tabel 8.39	61
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Instansi/SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015	61
Tabel 8.40	64
Indikasi Program Prioritas Instansi / SKPD Sekretariat Daerah Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015.....	64
Tabel 8.41	65
Rencana Tingkat Capaian Sekertarisat Dewan Kabupaten Musi Rawas	65
Tahun 2011-2015	65
Tabel 8.42	67
Indikasi Program Prioritas Sekertariat Dewan Kerangka Pendanaan	67
Tahun 2011-2016	67
Tabel 8.43	67
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015.....	67
Tabel 8.44	68
Indikasi Program Prioritas Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2016.....	68

Tabel 8.45	69
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Musi Rawas	69
Tahun 2011-2015	69
Tabel 8.46	70
Indikasi Program Prioritas Inspektorat Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2016	70
Tabel 8.47	71
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015	71
Tabel 8.48	75
Indikasi Program Prioritas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015	75
Tabel 8.49	75
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015	75
Tabel 8.50	77
Indikasi Program Prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015	77
Tabel 8.51	77
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015	77
Tabel 8.52	78
Indikasi Program Prioritas Kinerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015	78
Tabel 8.53	79

Rencana Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Musi Rawas 2011-2015	79
Tabel 8.54	81
Indikasi Program Prioritas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015.....	81
Tabel 8.55	82
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas	82
Tahun 2011-2015	82
Tabel 8.56	84
Indikasi Program Prioritas Dinas Perkebunan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015.....	84
Tabel 8.57	84
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Instansi / SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015	84
Tabel 8.58.....	85
Indikasi Program Prioritas Instansi / SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015.....	85
Tabel 8.59	86
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Kantor Ketahanan Pangan	86
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015.....	86
Tabel 8.60	87
Indikasi Program Prioritas Kantor Ketahanan Pangan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015.....	87
Tabel 8.61.....	88

Rencana Tingkat Capaian Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015.....	88
Tabel 8.62.....	89
Indikasi Program / Kegiatan Prioritas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015.....	89
Tabel 8.63.....	90
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015	90
Tabel 8.64.....	91
Indikasi Program / Kegiatan Prioritas Instansi / SKPD Dinas Kehutanan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015.....	91
Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas ditetapkan sasaran sebagai berikut:.....	92
Tabel 8.65	92
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Dians Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015.....	92
Tabel 8.66.....	93
Indikasi Program / Kegiatan Prioritas Dinas Pertambangan dan Energi Kerangka Pendanaan Tahun 2011-205.....	93
Tabel 8.67.....	94
Rencana Target Capaian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	94
Tahun 2011-2015	94
Tabel 8.68.....	95
Indikasi Program/Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2016.....	95

Tabel 8.69	95
Rencana Tingkat Capaian Kinerja RS dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015	95
Tabel 8.70	96
Indikasi Program/Kegiatan Prioritas RS dr. Sobirin Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015	96
Tabel 8.71	97
Rencana Tingkat Capaian Kinerja Rumah Sakit Rupit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015	97
Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, disusun program prioritas sebagaimana berikut:	98
Tabel 8.72	99
Indikasi Program Prioritas RSUD Rupit Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015	99